

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
16 Bulan Desember
BIRO TATA PEMERINTAHAN

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | Testimoni Pemerasa Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan | |
|-------|-----------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|----------------------------|---|---|---|----------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | | | | | | | Deviasi |
| 1 | 2.10.11 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN | 312.648.500 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 312.648.500 | 100,00 | 267.059.716 | 85,42 | 14,58 | | | | | | |
| 1.1 | 2.10.11.5.01 | Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | 312.648.500 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 312.648.500 | 100,00 | 267.059.716 | 85,42 | 14,58 | | | | | | |
| 1.1.1 | 2.10.11.5.01.01 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | 312.648.500 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 312.648.500 | 100,00 | 267.059.716 | 85,42 | 14,58 | Testimoni asistensi teknis dari batas desa oleh BIG dan testimoni buku kode dan data wilayah oleh BPS | https://drive.google.com/drive/folders/1N9_6S29G6N7Zg7Nhr8Zqg7VA4DEdE?usp=sharing | BIRO TATA PEMERINTAHAN Bagian Pemerintahan Umum | | | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY : 1. Terlaksananya rapat koordinasi internal; 2. Tersampainya surat permohonan data wilayah administrasi kepada Kabupaten/Kota berdasarkan surat Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Nomor 125 / 00181; 3. Penyusunan data wilayah tahun 2023 4. Telah dicetak buku kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY tahun 2023 5. Buku Kode dan Data Wilayah telah di distribusikan kepada OPD terkait</p> <p>B. Laporan pembinaan serta pengawasan penyetapan dan penetapan batas kalurahan : 1. Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka penyetapan penetapan batas kalurahan/keurahan di DIY; 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan BIG dalam rangka penyetapan penentuan penetapan batas kalurahan/keurahan. 3. Terlaksananya Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan di DIY selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 - 28 Februari 2023 dengan Narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dihadiri peserta dari OPD Tim Fokus Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota se DIY dan perwakilan lurah se DIY 4. Tersusuna Surat Gubernur DIY kepada Menteri Dalam Negeri terkait Laporan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan tahun anggaran 2023 5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penegasan Batas Kalurahan di Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo 6. Tersusuna surat Surat Perintah/ laporan Pelaksanaan kegiatan di Kab/Kota Semester 1 tahun 2023 7. Tersampainya Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas kalurahan/keurahan di DIY semester 1 dengan surat Nomor 146/964 tanggal 31 Agustus 2023 8. Terlaksananya Asistensi teknis dan verifikasi hasil pelaksanaan penetapan batas desa di DIY dengan verifikasi oleh pejabat dari Badan Informasi Geospasial 9. Terlaksananya Konsultasi dan Verifikasi Data Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan di DIY ke BIG bersama Kab/Kota C. Laporan Pembahasan Revisi Permenregi Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah : 1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan sinkronisasi batas daerah Kab. Gunungkidul - Kab. Wonorejo pada tanggal 08 Mei 2023 2. Telah dilaksanakan rapat kerja pelaksanaan usulan revisi permenregi batas DIY-Jateng pada segmen batas Kabupaten Sleman -Kab. Klaten dan Kab. Wonorejo - Kab. Sukoharjo. 3. Telah dilaksanakan rapat kerja pelaksanaan usulan revisi permenregi batas Kab. Kulon Progo - Kab. Sleman 4. Telah dilaksanakan tinjauan lapangan dalam rangka konfirmasi garis batas dan konfirmasi status jalan pada perbatasan di Kab. Gunungkidul - Kab. Sukoharjo sebagai titik lanjut raker batas bulan Mei 2023 5. Telah dilaksanakan usulan revisi permenregi batas tahun 2006 tentang batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 126/941 pada tanggal 18 Agustus 2023 kepada Kemendagri 6. Telah dilaksanakan koordinasi dengan usulan revisi Permenregi batas daerah Kab. Gunung Kidul -Kab. Klaten dan Kab. Kulon Progo. Perwarga & Kantor Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri pada tanggal 20 Desember 2023 7. Telah dilakukan koordinasi dan Tinjauan Lapangan pada Area Batas Daerah Kab. Kulon Progo DIY dengan Kab. Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Subsektren Kalurahan Jangaran - Desa Jogobopo 8. Telah dilakukan koordinasi dalam Rangka Memokalisasi Batas Azas Kesepakatan Terkait Segmen Batas Daerah di Perbatasan Kabupaten Kulon Progo DIY dengan Kabupaten Purwokerto Provinsi Jawa Tengah D. Laporan Sinkronisasi Garis Batas Daerah DIY - Jawa Tengah segmen Kab Kulon Progo - Kab Magelang 1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi melalui zoom meeting batas daerah kab. gunungkidul - Kab. Wonorejo pada sub segmen Kal. Sangayu - Desa Perangapulo. 2. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan tinjauan lapangan batas DIY - Jateng Segmen Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang di Kalurahan Gemboran, Ngargasan dan Pegertarjo 3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan tinjauan lapangan batas DIY - Jateng Segmen Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang di Kalurahan Jangartarjo dan Banjarjaya 4. Telah dilaksanakan rapat pembahasan dan expose hasil tinjauan lapangan batas DIY - Jateng Segmen Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang sebagai persiapan pelaksanaan Rapat Kerja dengan Kab Magelang dan Prov Jawa Tengah 5. Dilakukan rapat koordinasi dan inventarisasi permasalahan garis batas daerah dengan Pemab Jawa Tengah terkait rencana Rapat Kerja Pembahasan Sinkronisasi Batas Daerah DIY - Jateng segmen Kab Kulon Progo - Kab Magelang 6. Dilaksanakan Raker Sinkronisasi Garis Batas Daerah DIY-Jateng pada segmen Kab Kulon Progo dengan Kab Magelang E. Penyusunan peta batas daerah pada kawasan strategis Surulyo 1. Terlaksananya rapat koordinasi internal 2. Terlaksananya data dalam rangka pelaksanaan kegiatan 3. Terlaksananya petakan garis batas dan konfirmasi data awal lauh di kawasan strategis Surulyo 4. Tersusuna peta batas daerah pada kawasan strategis Surulyo 5. Kegiatan telah selesai dan pembahasan jasa konsultasi Penyusunan peta batas daerah pada kawasan strategis Surulyo dengan SPK Nomor 027/01/761 tanggal 21 Juni 2023 Faktor Penghambat: - elements s.d bulan Desember sebesar Rp 45.588.794 yaitu pada bulan ATK sebesar Rp 275.259, kerta cover Rp 12.075, bahan cetak Rp 511.200, bahan komputer Rp 276.400, honorarium Rp 1.200.000, tm Rp 5.200.000, jasa konsultasi Rp. 548.000, dan Rp 1.200.000, paket meeting Rp.14.112.249 Faktor Pendukung: - Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD Tim Penegasan Batas Daerah/Kelurahan di DIY - Koordinasi dan sinergi dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayah, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab di wilayah perbatasan berjalan baik dan lancar.</p> |
| 2 | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 220.334.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 220.334.000 | 100,00 | 217.606.600 | 98,76 | 1,24 | | | | | | |
| 2.1 | 2.12.02.1.01 | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | 24.464.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 24.464.000 | 100,00 | 24.431.600 | 99,87 | 0,13 | | | | | | |
| 2.1.1 | 2.12.02.1.01.02 | Pelayanan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | 24.464.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 24.464.000 | 100,00 | 24.431.600 | 99,87 | 0,13 | Testimoni dari LKSA yang telah terfasilitasi dokumen administrasi Kependudukan bagi penduduk rentan administratif | https://drive.google.com/drive/folders/1F4WqyNhr8Zg7Nhr8Zqg7VA4DEdE?usp=sharing | DIY | | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi : 74 Dokumen dari 50 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (KK, KIA, KTP, EI, Akta Kelahiran) : 73 dokumen dari 49 dokumen 3. Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Tersusunnya jadwal kegiatan pendaftaran penduduk non permanen dan rentan administratif tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan raker pendaftaran penduduk non permanen dan rentan administratif pada tanggal 24 Februari 2023; 3. Terlaksananya rapat kerja pendaftaran penduduk rentan administratif pada tanggal 15 Maret 2023; 4. Koordinasi evaluasi pelaksanaan raker kerja pendaftaran rentan dan penduduk non permanen pada bulan April 2023 5. Terlaksananya koordinasi persiapan rapat kerja penduduk rentan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni; 6. Terlaksananya rapat kerja penduduk rentan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023 dengan partisipasi ketercapaian LKSA di wilayah DIY dan Dinas Dukcapil Kab/Kota se-DIY; 7. Terlaksananya rapat kerja penduduk non permanen yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2023 membahas mengenai progress pendataan dan pendataan penduduk non permanen di Kabupaten/Kota se-DIY; 8. Terlaksananya fasilitasi dan penyediaan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan pada bulan Agustus 2023; 9. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dokumen administratif kependudukan bagi penduduk rentan pada bulan September - Desember 2023; 10. Terlaksananya evaluasi kegiatan Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administratif Tahun 2023 serta penyusunan laporan kegiatan pada bulan Desember 2023; 11. Tematik Kemiskinan Ekstrem & RB Tematik Pengentasan Kemiskinan : - Telah dilakukan rapat kerja pendataan penduduk rentan administratif sebanyak 4 kali pada tanggal 15 Maret 2023 dan 14 Juni 2023 dengan mengundang beberapa ahli/LKSA di wilayah DIY serta Dinas Dukcapil Kab/Kota se-DIY untuk selanjutnya perlu/LKSA melakukan pendataan anak stunting yang belum memiliki dokumen kependudukan (KK, Akta Kelahiran, KIA dan KTP-EI). - Setelah terkumpul data dari para/LKSA, dokumen pendukung diserahkan ke Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk dapat segera diterbitkan dokumen kependudukan; - Sampai dengan bulan Desember 2023 telah terfasilitasi sebanyak 73 dokumen administratif kependudukan kepada anak para/LKSA. Faktor Penghambat: - Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pernahnya masyarakat terkait kependudukan dokumen administratif kependudukan dan pendataan penduduk non permanen. - Topografi wilayah Gunungkidul membuat instansi yang berkaitan dengan administratif, prakarya cukup jauh sehingga masyarakat merasa untuk mendapatkan pelayanan kependudukan. - Telah dilakukan jemput bola pelayanan administratif namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan persyarat kependudukan.</p> | |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan | | | | | |
|-------|-----------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|--|---|--|--|---|---------|--|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | | | | | | | Realisasi (%) | Deviasi | | | |
| 2.2 | 2.12.02.1.02 | Penyenggaraan Pendaftaran Kependudukan | 195.870.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 195.870.000 | 100,00 | 193.175.000 | 98,62 | 1,38 | | | | - terdapat sisa belanja ATK bulan Oktober sebanyak Rp 25.300,- - terdapat sisa belanja kertas/cover bulan Oktober sebanyak Rp 7.200,- Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Diy - terdapat layanan jemput bola yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota sehingga dapat mempermudah layanan administrasi kepada petani dan UKM | | | | | |
| 2.2.1 | 2.12.02.1.02.01 | Facilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | 19.220.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 19.220.000 | 100,00 | 18.645.100 | 97,01 | 2,99 | Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta Yogyakarta menyambut baik kegiatan terkait pendaftaran Warga Negara asing di wilayah Indonesia khususnya wilayah DIY. Pada tahun 2022 ini Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menyiapkan fasilitas terkait pindah datang WNA yang dititiknol di kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta sebagai salah satu upaya pendataan WNA yang lebih akurat. Rapor Kerja WNA yang dilakukan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY juga sebagai upaya pendataan WNA yang lebih akurat menyerai ke perusahaan/sponsor. | https://drive.google.com/drive/folders/1d4k1z2ULJ2SH9KUGY-pW6G096j6fz?usp=sharing | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk | 1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk : 1 Laporan dan 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rapor Kerja Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk : 1 Laporan dan 1 Laporan | | | | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitas terkait pendaftaran penduduk tahun 2022. 2. Terlaksananya rapat koordinasi terkait fasilitas pendaftaran penduduk pada bulan Januari 2022. 3. Terlaksananya rapat kerja pendaftaran warga negara asing di wilayah NGSJ secara daring dengan peserta dari perusahaan/sponsor yang memiliki pegawai WNA dan narasumber dari Dinas Dukcapil Kemendagri dan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 2022. 4. Terlaksananya kegiatan coffee morning terkait pendataan WNA & DTI secara daring dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota se-Diy dan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta pada 14 Maret 2022. 5. Terlaksananya kegiatan terkait Kartu Identitas Anak dan Pendaftaran Pindah Dibayar Orang Asing di Wilayah NGSJ pada bulan April 2022. 6. Terlaksananya Rapor Kerja Pendaftaran Penduduk pada tanggal 21 Mei 2022 dengan peserta dari mahasiswa UGM, UIN, UIN, UIN dan UII. 7. Terlaksananya rapat koordinasi internal terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait kerja pendaftaran penduduk pada bulan Juni 2022. 8. Terlaksananya rapat koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota pada 20 Juli 2022 membahas terkait pendaftaran penduduk. 9. Terlaksananya evaluasi internal kegiatan Fasilitas terkait Pendaftaran Penduduk pada bulan September 2022. 10. Tersusunnya laporan kegiatan Fasilitas terkait Pendaftaran Penduduk pada bulan Desember 2022. Faktor Penghambat: - efisiensi yang kurang seperti raker warga negara asing pada bulan Februari 2023 sebanyak Rp 480.000 - efisiensi belanja alat tulis kantor bulan April 2023 sebanyak Rp 25.200 - efisiensi belanja kertas cover bulan April 2023 sebanyak Rp 5.200 - efisiensi uang transport peserta raker fasilitas pendaftaran penduduk pada bulan Mei 2023 sebanyak Rp 60.000 - efisiensi belanja flashdisk bulan Juli 2023 sebesar Rp 4.400 Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Diy |
| 2.2.2 | 2.12.02.1.02.02 | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk | 176.650.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 176.650.000 | 100,00 | 174.529.900 | 98,80 | 1,20 | | | | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya jadwal kegiatan sosialisasi terkait administrasi kependudukan tahun 2022; 2. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan sosialisasi pada bulan Februari 2022 dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota, Kapanewon/Kemantren, Kelurahan/Indukhan yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi; 3. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peremendagri 73 Tahun 2022 pada tanggal 14 Februari 2022 dengan peserta dari TP PKK di beberapa Kapanewon dan Perumahan RT di DIY; 4. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 16 Februari 2022 di Kurahan Giwangan; 5. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 17 Februari 2022 di Kelurahan Suryataman; 6. Terpublikasikannya kegiatan Sosialisasi Peremendagri 73 Tahun 2022 pada tanggal 15 Februari 2022 melalui surat kabar Tribun Jogja; 7. Terpublikasikannya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA yang dilakukan di Kelurahan Giwangan dan Suryataman pada tanggal 20 Februari 2022 melalui surat kabar Tribun Jogja; 8. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 2 Maret 2023 di Kapanewon Sertolo; 9. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 3 Maret 2023 di Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman; 10. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 9 Maret 2023 di Kelurahan Berdungan, Kapanewon Wates, Kulon Progo; 11. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 16 Maret 2023 di Kelurahan Triand, Kapanewon Sleman, Sleman; 12. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 17 Maret 2023 di Kapanewon Gamping, Sleman; 13. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi administrasi pada bulan April 2023 dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota, Kapanewon Kemantren, Kelurahan/Indukhan yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi; 14. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 11 Mei 2023 di Kelurahan Pengasih, Kulon Progo; 15. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 19 Mei 2023 di Kelurahan Sinduradi, Sleman; 16. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 25 Mei 2023 di Kapanewon Sewon, Sleman; 17. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 8 Juni 2023 di Kelurahan Ploa, Kapanewon Paksi, Gunungkidul; 18. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 9 Juni 2023 di Kapanewon Wonorejo, Gunungkidul; 19. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 15 Juni 2023 di Kelurahan Logandora, Kapanewon Playen, Gunungkidul; 20. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 15 Juni 2023 di Kelurahan Logandora, Kapanewon Playen, Gunungkidul; 21. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 22 Juni 2023 di Kapanewon Playen, Gunungkidul; 22. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital & lingkungan Kotron Nanyogyakarta pada 14 Juli 2022 dan Kabupaten Pukuhawan pada 26 Juli 2022; 23. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital lanjutan di lingkungan Kotron Nanyogyakarta pada 7 dan 8 Agustus 2022; 24. Terlaksananya sosialisasi terkait administrasi kependudukan di media sosial pada bulan September 2022; 25. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terkait cakupan dan layanan IKD di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota pada bulan Oktober 2022; 26. Tersusunnya laporan kegiatan Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk pada bulan Desember 2022; Faktor Penghambat: - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebesar Rp 85.200 - efisiensi belanja kertas dan cover sebesar Rp 14.100 - efisiensi belanja baterai sebesar Rp 20.100 - efisiensi honor narasumber kegiatan sosialisasi DPRD sebagai narasumber pada kegiatan Sosialisasi Administrasi di Kelurahan Berdungan, Wates, Kulon Progo 9 Maret 2023 sebesar Rp 1.000.000,- - efisiensi honor narasumber kegiatan Sosialisasi DPRD DIY sebagai narasumber kegiatan Sosialisasi Administrasi di Kapanewon Wonorejo, Gunungkidul 9 Juni 2023 sebesar Rp 1.000.000,- - kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang rencana dilaksanakan pada bulan September dibayar pelaksanaan karena perubahan anggaran dan refocusing tahun 2023 yg masih menunggu teledak lanjut (sebesar Rp 2.000.000,-) - kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tertunda pada bulan September, dilakukan pada bulan Oktober karena refocusing anggaran tidak jadi dilaksanakan Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Diy | | | | | |
| 3 | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 72.142.900 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 72.142.900 | 100,00 | 70.692.600 | 97,99 | 2,01 | | | | | | | | | |
| 3.1 | 2.12.03.1.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | 41.622.200 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 41.622.200 | 100,00 | 41.320.900 | 99,28 | 0,72 | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | 2.12.03.1.01.04 | Facilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | 41.622.200 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 41.622.200 | 100,00 | 41.320.900 | 99,28 | 0,72 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk | 1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota : 1 Laporan dan 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Terpadu Fasilitas Dokumen Administrasi Kependudukan : 1 Laporan dan 1 Laporan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. tersusunnya jadwal kegiatan sosialisasi pelayanan kependudukan tahun 2022; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal terkait pendaftaran penduduk pada bulan Januari 2022. 3. Terlaksananya pendataan penunjang pelayanan terpadu (clearing klt, film, ribbon) pada bulan Maret 2022. 4. Terlaksananya penunangan korsep pelayanan terpadu yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2022. 5. Terlaksananya koordinasi internal terkait pelaksanaan pelayanan terpadu. 6. Terlaksananya koordinasi terkait klt Kabupaten yang akan menjadi lokasi pelayanan terpadu dengan memperhatikan jumlah warga KTP-P yang belum dilaksanakan pemukiman korseptual. 7. Telah dilakukan pemohonan personel pelayanan terpadu kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. 8. Telah dilakukan pencetakan spanduk pada bulan Juli 2022. 9. Terlaksananya pelayanan terpadu pemukiman KTP-P di Kabupaten Gunungkidul selama dua hari pada 21 Agustus 2022 (180) dan 21 Agustus (SMK N 3 Wonorejo (210) dan SMK 2 Playen (91)). Hasil pelayanan selama dua hari pemukiman KTP-P sebanyak 67 orang dan pemukiman Identitas Kependudukan Digital sebanyak 102 orang. 10. Terlaksananya koordinasi internal mengenai evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu pada bulan Agustus 2022. 11. Terlaksananya belanja alat tulis kantor penunjang pelaksanaan kegiatan Fasilitas Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota pada bulan Oktober 2022. 12. Tersusunnya laporan kegiatan Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota pada bulan Desember 2022. Faktor Penghambat: - Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pernahnya masyarakat terkait konsep pelayanan administrasi kependudukan. - Telah dilakukan jemput bola pelayanan administrasi namun masih ada masyarakat yang menunda pelayanan pemukiman kependudukan. - efisiensi belanja pengadaan alat penunjang pelayanan terpadu (clearing klt, film, ribbon) sebesar Rp 398.100 - banyak siswa/usia 16 tahun keatas sudah melakukan pemukiman di Kapanewon/Dinas Dukcapil | | | | | |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan |
|-------|-----------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | | | | | | |
| 3.2 | 2.12.03.1.02 | Penyenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | 30.520.700 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 30.520.700 | 100,00 | 29.371.700 | 96,24 | 3,76 | | | | <ul style="list-style-type: none"> - efisiensi belanja alat tulis kantor bulan Oktober sebesar Rp 3.000,- - Terimakasih dan koordinasi yang baik antara Biro Telem DIY dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota untuk melakukan pelayanan jemput bola pemohon KTP-el di sekolah dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital |
| 3.2.1 | 2.12.03.1.02.01 | Penyenggaraan Pencatatan Sipil | 26.104.500 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 26.104.500 | 100,00 | 25.064.400 | 96,02 | 3,90 | DIY | <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 1 Laporan dan 1 Laporan 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pelayanan Fasilitas Isbat Nihai : 1 Laporan dan 1 Laporan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitas terkait pencatatan sipil tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal penajapan kegiatan fasilitas terkait pencatatan sipil tahun 2023; 3. Terdistribusikannya surat terkait permohonan pendaftaran potensi isbat nihai di Kabupaten/Kota pada bulan Maret 2023; 4. Penetapan potensi isbat nihai di Kabupaten/Kota di DIY pada bulan April 2023; 5. Monitoring pendataan potensi isbat nihai di Kabupaten/Kota di DIY pada bulan Mei 2023; 6. Koordinasi terkait surat lanjut surat permohonan data potensi isbat nihai di Kabupaten/Kota dengan batas maksimal penyerapan data pada akhir bulan Juni; 7. Terformulasinya potensi isbat nihai di Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan isbat nihai, sehingga kegiatan isbat nihai yang direncanakan di Kabupaten/Kota Progo batal dilaksanakan; 8. Termentransmisinya data potensi pasangan yang akan isbat nihai untuk dikumpulkan di KIA, Station dan diuploadkan surat pengantar dari KIA kepada Pengadilan Agama Wonorejo untuk verifikasi dan validasi; 9. Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah ke Kabupaten Gunungkidul pada bulan September 2023 dalam rangka koordinasi dan penajapan pelaksanaan isbat nihai serta pembayaran paragraf isbat nihai; 10. Terlaksananya kegiatan sidang terpadu isbat nihai kepada 20 pasangan bertempat di Kalurahan Jetis, Kabupaten Saptosari, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 12 Oktober 2023; 11. Tersusunnya laporan kegiatan Fasilitas terkait Pencatatan Sipil tahun 2023 pada bulan Desember 2023; <p>Rf Tematik Pengantaraan Kemiskinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pendataan potensi isbat nihai di seluruh Kabupaten/Kota di DIY sejak awal tahun 2023; - Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memantapkan data akas potensi isbat nihai; - Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo memantapkan data isbat nihai di wilayahnya namun dari hasil pendataan, potensi isbat nihai di Kabupaten Kulon Progo tidak memenuhi syarat untuk dilakukan isbat nihai, sehingga kegiatan isbat nihai yang direncanakan di Kabupaten Kulon Progo batal dilaksanakan; - Terdapat potensi isbat nihai di Kabupaten Gunungkidul, sehingga akan dilakukan isbat nihai untuk 20 pasangan pada bulan Oktober 2023; - Pada bulan Agustus, telah dilakukan inventarisasi data potensi pasangan yang akan isbat nihai untuk dikumpulkan di KIA Station dan diuploadkan surat pengantar dari KIA kepada Pengadilan Agama Wonorejo untuk verifikasi dan validasi; - Verifikasi dan validasi berita isbat nihai dilaksanakan pada bulan September 2023 oleh Pengadilan Agama Wonorejo; - Terlaksananya kegiatan sidang terpadu isbat nihai kepada 20 pasangan bertempat di Kalurahan Jetis, Kabupaten Saptosari, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 12 Oktober 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesediaan, ketidaktahuan dan belum pernahnya masyarakat terkait keperguruan dokumen administrasi kependudukan; - Topografi wilayah Gunungkidul membuat instansi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan jauh sehingga masyarakat menunda untuk melampirkan dokumen kependudukannya; - Telah dilakukan jemput bola pelayanan administrasi namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan pendataan kependudukannya; - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebesar Rp 48.100 - efisiensi biaya pembayaran paragraf isbat nihai ke Pengadilan Agama Wonorejo pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp 1.000.000,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terimakasih dan koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota - Terimakasih dan koordinasi yang baik dengan perangkat Kabupaten Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, KIA Kabupaten Sleman, Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul | |
| 3.2.1 | 2.12.03.1.02.01 | Fasilitas terkait Pencatatan Sipil | 26.104.500 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 26.104.500 | 100,00 | 25.064.400 | 96,02 | 3,90 | DIY | <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 1 Laporan dan 1 Laporan 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pelayanan Fasilitas Isbat Nihai : 1 Laporan dan 1 Laporan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan koordinasi berhalat antar lembaga pemerintah dan non pemerintah kelevengaran provinsi terkait pencatatan sipil tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal penajapan kegiatan kerja sama pemberian insentif bagi pemegang KIA tahun 2023; 3. Terlaksananya kegiatan rapat kerja kerja sama pemanfaatan kartu identitas anak di DIY pada tanggal 21 Maret 2023; 4. Tersusunnya dokumen perancangan perjanjian kerja sama pemberian insentif KIA di DIY antara Pemda DIY dengan Museum Ullen Sentali, Rudalisk Modern Bicycle Outlet Yogyakarta, Toko Buku Diskon Togamas Alfabeta Yogyakarta, Kay's Studio Yogyakarta, Gemendia Sudirman Jogja, Puri Mataram Resto Cafe & Wahana Wisata, Gardens Department Store & Supermarket, PT Produk Rekreasi (Kids Fun) pada bulan April 2023; 6. Terlaksananya perancangan perjanjian kerja sama pemberian insentif KIA di DIY antara Pemda DIY dengan Museum Ullen Sentali, Rudalisk Modern Bicycle Outlet Yogyakarta, Toko Buku Diskon Togamas Alfabeta Yogyakarta, Kay's Studio Yogyakarta, Gemendia Sudirman Jogja, Puri Mataram Resto Cafe & Wahana Wisata, Gardens Department Store & Supermarket, PT Produk Rekreasi (Kids Fun); 7. Terlaksananya penandatanganan perjanjian kerja sama pemberian insentif bagi pemda KIA di DIY pada tanggal 23 Juni 2023 antara Pemda DIY dengan Group Yogyakarta, Purna Caraka Music Studio Yogyakarta, Rhythm & Grooves Music Star Music School Yogyakarta, Hugo Violin School Yogyakarta, Hiji Chicken & Ayam Gorepek Sali 8. Terlaksananya koordinasi dengan stakeholder yang telah melakukan kerja sama pemberian insentif bagi anak pemda KIA di DIY untuk memantapkan hari anak nasional pada bulan Juli dengan memberikan diskon khusus; 9. Terlaksananya koordinasi dengan Nawangren Sleman yang bermaksud melakukan kerja sama pemberian insentif KIA di DIY pada bulan Agustus 2023; 10. Terlaksananya penandatanganan perjanjian kerja sama pemberian insentif KIA di DIY antara Pemerintah Daerah DIY dengan Nawangren Sleman pada bulan September 2023 secara fisik dan desk; 11. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerja sama pemberian insentif KIA di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY pada bulan Oktober 2023; 12. Tersusunnya laporan kegiatan koordinasi Berhalat Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kelevengaran Provinsi terkait Pencatatan Sipil tahun 2023 pada bulan Desember 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat sisa belanja alat tulis kantor pada bulan Juli 2023 sebesar Rp 8.800 karena harga miri yang lebih rendah dari anggaran yang ada; - efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 100.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koordinasi yang baik antara mitra kerja sama / stakeholder yang memberikan insentif bagi pemegang KIA di DIY | |
| 3.2.2 | 2.12.03.1.02.04 | Koordinasi Berhalat Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kelevengaran Provinsi terkait Pencatatan Sipil | 4.416.200 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 4.416.200 | 100,00 | 4.307.300 | 97,53 | 2,47 | Daerah Istimewa Yogyakarta | <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berhalat Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kelevengaran Provinsi terkait Pencatatan Sipil : 7 Dokumen dan 3 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemberian Insentif Bagi Anak Pemda KIA di Wilayah DIY : 7 Dokumen dan 3 Dokumen | <ul style="list-style-type: none"> 1. Stakeholder yang melakukan kerja sama pemberian insentif bagi anak di DIY yang memiliki KIA merasa senang jika berupaya meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi (khususnya KIA) dengan adanya kerja sama ini. Publikasi yang merajai kewajiban Biro Tata Pemerintahan Setda DIY juga telah dilaksanakan baik melalui media sosial, media cetak maupun elektronik untuk meningkatkan publikasi stakeholder. | |
| 4 | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN | 67.573.800 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 67.573.800 | 100,00 | 65.062.091 | 96,28 | 3,72 | | | | |
| 4.1 | 2.12.04.1.02 | Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 67.573.800 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 67.573.800 | 100,00 | 65.062.091 | 96,28 | 3,72 | | | | |
| 4.1.1 | 2.12.04.1.02.01 | Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 32.331.100 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 32.331.100 | 100,00 | 31.170.091 | 96,41 | 3,59 | Daerah Istimewa Yogyakarta | <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan : 1 Laporan dan 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan Pemantauan Operasional SIAM : 1 Dokumen dan 1 Dokumen | <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitas terkait pengembangan informasi administrasi kependudukan tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal penajapan kegiatan fasilitas terkait PIAK tahun 2023; 3. Termentransmisinya data operasional SIAM (SMB) semester II tahun 2022 pada bulan Maret 2023; 4. Terlaksananya rapat koordinasi operasional SIAM pada bulan April 2023 dalam rangka mendukung Dukcapil Kependudukan Digital 5. Terlaksananya pengembangan sistem informasi untuk mendukung solusi PPDB DIY tahun 2023 pada bulan Mei 2023; 6. Tersedianya data kependudukan untuk mendukung PPDB SMA/ SD/ DIT dan termentransmisikannya data terkait data kependudukan oleh sistem SIAM melalui sistem informasi sinkronisasi data PPDB DIY pada bulan Juni 2023; 7. Telah dilakukan layanan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital di lingkungan Kraton Ngayogyakarta dan Kodipaten Pukelman dan memantapkan jaringan pelayanan terpadu dengan baik pada bulan Juli 2023; 8. Telah dilakukan layanan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital layanan di lingkungan Kraton Ngayogyakarta dan memantapkan jaringan pelayanan terpadu dengan baik pada 7 dan 8 Agustus 2023; 9. Terlaksananya pelayanan terpadu perembanan KTP-el dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Gunungkidul serta memantapkan jaringan pelayanan terpadu dengan baik pada 21 dan 24 Agustus 2023; 10. Telah dilakukan belanja operasional SIAM untuk service perangkat komputer yang digunakan untuk mengoperasikan SIAM pada bulan September 2023 - 11. Telah dilakukan belanja penyediaan internet SIAM bulan Oktober 2023; 12. Terlaksananya belanja operasional SIAM pada bulan November 2023; 13. Telah dilakukan koordinasi terkait pelaksanaan PPDB tahun 2024 bersama dengan Dinas Dipora DIY pada bulan Desember 2023; 14. Tersusunnya laporan kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tahun 2023 pada bulan Desember 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebanyak Rp 120.100 - efisiensi belanja kertas dan cover Rp 6.000 - efisiensi belanja internet bulan Januari Rp 52.043 | |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan |
|-------|-----------------|---|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|--|--|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - efisiensi belanja internet bulan Februari Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Maret Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan April Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Mei Rp 52.043 - pengembangan sistem informasi untuk mendukung seleksi PPKB DIY 2023 terkait administrasi dilaksanakan pada bulan Mei 2023 menggunakan konsep pelaksanaan PPKB di Dinas Dikpora DIY - efisiensi belanja internet bulan Mei Rp 52.043 - efisiensi belanja pengembangan sistem informasi untuk mendukung seleksi PPKB DIY tahun 2023 bulan Mei 2023 sebesar Rp 300.000 - efisiensi belanja internet bulan Juni Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Juli Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Agustus Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan September Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Oktober Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan November Rp 52.043 - efisiensi belanja operasional SIAK bulan November sebesar Rp 65.000 - efisiensi belanja internet bulan Desember Rp 48.436 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota se-DIY - Koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dalam proses seleksi PPKB DIY 2023 |
| 4.1.2 | 2.12.04.1.02.05 | Penyenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 35.242.700 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 35.242.700 | 100,00 | 33.892.000 | 96,17 | 3,83 | <p>https://drive.google.com/drive/folders/1m-zu9p7hFTTjshakKqGgByd4Pp?usp=sharing</p> <p>- Instansi yang melakukan pemindahan data menjadi sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan untuk verifikasi dan validasi data kependudukan. - Peserta Rapat Kerja "Memanfaatkan Data Kependudukan" bagi Pemilih pada Pemilu 2024 di Lingkungan Civitas Akademik" mengundang perwakilan Rektor Universitas yang memiliki TPS Kampus, perwakilan BEM perguruan tinggi dan Forum BEM DIY pada tanggal 19 September 2023 menjadi sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini sebagai salah satu sosialisasi adanya TPS Kampus yang sudah terampil 18 perguruan tinggi</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal penajapan kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan tahun 2023; 3. Penyempurnaan data kependudukan dari Dinas Sosial DIY terkait verifikasi data penerima bantuan sosial khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY; 4. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan rapat kerja terkait sinkronisasi data pemilu 2024 pada bulan April 2023; 5. Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Konsolidasi Data Pemilih pada Pemilu dan Pilkada dengan peserta dari mahasiswa/UGM pada bulan Mei 2023; 6. Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja "Dukung Pemerintah Daerah untuk Data Pemilih-Pilkada Serentak 2024 yang Berkualitas" pada tanggal 30 Juni 2023; 7. Terlaksananya pemohonan data IPS DIY terkait NK, ASN Pemda DIY untuk mendukung finalisasi data Register pada bulan Juni 2023; 8. Terfinalisasinya pemohonan data PPL PLANU Jawa Tengah dan DIY UPTD Yogyakarta terkait data rumah kepala keluarga di DIY tahun 2023 pada bulan Juli 2023; 9. Terlaksananya Data Konsolidasi Berah (DKB) Semester 1 Tahun 2023 pada bulan Agustus 2023 sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi/lembaga; 10. Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja "Memanfaatkan Dokumen Administrasi Bagi Pemilih pada Pemilu 2024 di Lingkungan Civitas Akademik" mengundang perwakilan Rektor Universitas yang memiliki TPS Kampus, perwakilan BEM perguruan tinggi dan Forum BEM DIY pada tanggal 19 September 2023; 11. Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja "Administrasi Kependudukan Terkini, Koordinasi Kaut, Optima Pemilih di DIY Aman, Juri dan Damai" mengundang Kepala Beker dan perwakilan Kabupaten yang memiliki potensi keawanan saat Pemilu 2024 pada tanggal 22 September 2023; 12. Target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mempengaruhi pelaksanaan output pada bulan Oktober 2023 (terjadi ketidakefisienan realisasi 99 kumulatif dan data di samping); 13. Telah dilaksanakan surat pemohonan penggantian kerja sama pemanfaatan data kependudukan ke Dinas Dikpora DIY dari 3 (tiga) instansi yaitu Dinas Dikpora DIY, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 14. Terlaksananya rapat koordinasi pada bulan Oktober 2023 terkait sinkronisasi data kependudukan dan informasi dari Penerima Kependudukan DIY terkait potensi kerja sama pemanfaatan web portal dan sistem Kemendagri untuk layanan di instansi tersebut; 15. Terlaksananya koordinasi terkait perubahan Permenandag 10/2019 menjadi Permenandag 17/2023 dan implikasi kepada surat penggantian kerja sama Dinas, BKK dan Dikpora yang sementara di hold menunggu prosedur baru menyesuaikan dengan Permenandag 17/2023 tersebut; 16. Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja "Dukung Administrasi Kependudukan bagi Pemutakhiran Data Pemilih dan Peringatan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di DIY" pada tanggal 14 Desember 2023 mengundang Lurah yang memiliki potensi pindah datang cukup tinggi di DIY; 17. Tersusunnya laporan kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan tahun 2023 pada bulan Desember 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - belum ada anggaran kas keuangan pada triwulan 1 karena penganggaran dimulai pada bulan April 2023 namun persiapan dan kegiatan telah dilakukan tanpa dukungan anggaran. - Terlaksananya akses database kependudukan akibat perubahan SIAK terpusat, saat ini database kependudukan dihosting sepenuhnya oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri - Efisiensi honor narasumber rapat kerja data pemilih-pilkada 2024 karena ketidakefisienan (PPRD DIY) pada bulan Juni 2023 sebesar Rp 1.000.000 - terdapat sisa belanja alat tulis kantor dan kertas pada bulan Juli 2023 sebesar Rp 50.700 - efisiensi yang tercapai peserta Rapat Kerja "Administrasi Kependudukan Terkini, Koordinasi Kaut, Optima Pemilih di DIY Aman, Juri dan Damai" pada tanggal 22 September 2023 karena beberapa peserta dari kabupaten sebesar Rp 300.000; - terdapat perubahan Permenandag 10/2019 menjadi Permenandag 17/2023 sehingga penggantian kerja sama yang diusulkan (Dinas, BKK, Dikpora) di hold sementara waktu menunggu prosedur yang baru <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instansi/QPO dapat melakukan pemanfaatan data kependudukan melalui Dinas Dukcapil | | |
| 5 | 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 41.126.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 41.126.000 | 100,00 | 41.126.000 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| 5.1 | 2.12.05.1.01 | Penyediaan Profil Kependudukan | 41.126.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 41.126.000 | 100,00 | 41.126.000 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| 5.1.1 | 2.12.05.1.01.02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kabupaten yang lain | 41.126.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 41.126.000 | 100,00 | 41.126.000 | 100,00 | 0,00 | <p>https://drive.google.com/drive/folders/1EaW1Ct0E2SqU3hIcyPuAq09yVtGGR?usp=drive_jnk</p> | <p>Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kabupaten Lain : 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Profil Data dan Proyeksi Kependudukan dan Pemanfaatan Data : 1 Dokumen | <p>Profil Kependudukan tersusun dengan baik oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota di DIY dan Provinsi sehingga sudah dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika maupun masyarakat yang memerlukan</p> |
| 6 | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 50.000.000 | 100,00 | 44.631.700 | 89,26 | 10,74 | | | | |
| 6.1 | 2.13.04.1.01 | Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 50.000.000 | 100,00 | 44.631.700 | 89,26 | 10,74 | | | | |
| 6.1.1 | 2.13.04.1.01.02 | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa | 15.306.800 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 15.306.800 | 100,00 | 14.718.800 | 96,16 | 3,84 | <p>https://bnyar.com/testimoniKetuaNayantaka</p> | <p>BIRD TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kabupaten/Kelurahan dan Kapanewton/Kemantren</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen 3. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam upaya pembinaan dalam membangun pemerintahan desa dalam upaya penyelesaian permasalahan Dukuh pada tanggal 2 Februari; - Koordinasi dalam konteks desa / kalurahan di DIY sehingga adanya kebijakan penataan desa dalam aspek kebijakan reformasi birokrasi - Pelaksanaan Rapat Kerja Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa dengan pengutan manajemen pada aspek inovasi pelayanan publik di Kalurahan pada tanggal 18 Juli melibatkan pemateri dari unsur peneliti "Institute for Research and Empowerment" (IRE) - Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen - Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 588.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan Nayantaka sebagai Pengayuh Lurah dan Pemula Pemula untuk hasil memberikan arahan - Kelembagaan pemula khususnya dari Kemendagri dan Dinas PPK 4 Kabupaten untuk hasil memberikan arahan dan masukan dalam rapat koordinasi - Komitmen waktu dan penyediaan materi yang relevan sesuai tema oleh narasumber dalam pelaksanaan rapat kerja pembinaan manajemen pemerintahan desa |
| 6.1.2 | 2.13.04.1.01.04 | Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | 18.088.400 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 18.088.400 | 100,00 | 14.251.400 | 78,79 | 21,21 | <p>https://bnyar.com/testimoniKetuaNayantaka</p> | <p>BIRD TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kabupaten/Kelurahan dan Kapanewton/Kemantren</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa : 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa : 1 Dokumen 3. Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa : 1 Dokumen | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa - Kelembagaan pemula khususnya dari Kemendagri dan Dinas PPK 4 Kabupaten untuk hasil memberikan arahan dan masukan dalam rapat koordinasi - Komitmen waktu dan penyediaan materi yang relevan sesuai tema oleh narasumber dalam pelaksanaan rapat kerja pembinaan manajemen pemerintahan desa |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan |
|-------|-----------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------|--------------------------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>dalam Penyusunan Petunjuk Teknis Pedoman Reformasi Birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Kerja Pembinaan Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Desa dengan melibatkan Balai PHD dan RE Yogyakarta dan Kabupaten Progo sebagai target 8 Agustus - Target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mempengaruhi ketercapaian output karena sudah dilaksanakan melalui rapat-rapat kecil secara intens. - Pelaksanaan Rapat Kerja Fasilitas Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan Desa pada tanggal 7 November melibatkan OPD DIT dan Kabupaten untuk melakukan koordinasi terhadap perencanaan pembangunan desa sehingga dilaksanakan reformasi birokrasi <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam pelaksanaan bulat bulat sempat terkendala adanya satu aktivitas kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dikarenakan menunggu penetapan APBD Perubahan 2023 dan kegiatan refocusing karena arahan dari TAPD kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena masih menunggu evaluasi Kementerian, namun target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mempengaruhi ketercapaian output karena sudah dilaksanakan melalui rapat-rapat kecil secara intens dan telah dilaksanakan Rapat Kerja untuk koordinasi terkait perencanaan pembangunan kurahan - Adanya efisiensi paket meeting dan adanya sisa honor narasumber sebesar Rp. 3.837.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesediaan Nelayanka selaku Paguyuban Luruh dan Pemang Provisi untuk hadir memberikan arahan - Kesediaan peserta khususnya dari Kementerian dan Dinas PPK 4 Kabupaten untuk hadir memberikan arahan dan masukan dalam rapat koordinasi - Komitmen tinggi dan penyampaian materi yang relevan sesuai tema oleh narasumber dalam pelaksanaan rapat kerja pembinaan manajemen pemerintahan desa - Penetapan RAPROD perubahan sehingga aktivitas sub kegiatan dapat dilaksanakan |
| 6.1.3 | 2.13.04.1.01.05 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 16.604.800 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 16.604.800 | 100,00 | 16.661.500 | 94,32 | 5,68 | | | <p>Testimoni Ketua Paguyuban Luruh DIY Nelayanka terkait aktivitas Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa</p> <p>https://fbnyur.com/testimoni/ketuaNelayanka</p> <p>BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kurahan/Kelurahan dan Kabupaten/Kemantren</p> <p>1. Jumlah Dokumen Hasil Terlembaganya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Jumlah Dokumen Hasil Terlembaganya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raport Koordinasi Fasilitas Keuangan Desa dengan Dinas PPK 4 Kabupaten - Rapat Kerja Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada tanggal 15 November 2023 dan kegiatan refocusing karena arahan dari TAPD kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena masih menunggu evaluasi Kementerian, namun target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mempengaruhi ketercapaian output karena sudah dilaksanakan melalui rapat-rapat kecil secara intens dan telah dilaksanakan Rapat Kerja untuk koordinasi terkait perencanaan pembangunan kurahan - Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 943.300 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesediaan Nelayanka selaku Paguyuban Luruh dan Pemang Provisi untuk hadir memberikan arahan - Kesediaan peserta khususnya dari Kementerian dan Dinas PPK 4 Kabupaten untuk hadir memberikan arahan dan masukan dalam rapat koordinasi - Komitmen tinggi dan penyampaian materi yang relevan sesuai tema oleh narasumber dalam pelaksanaan rapat kerja pembinaan manajemen pemerintahan desa - Penetapan RAPROD perubahan sehingga aktivitas sub kegiatan dapat dilaksanakan | |
| 7 | 2.22.08 | PROGRAM PENYELANGSARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA UJIAN KEBUDAYAAN | 385.850.700 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 385.850.700 | 100,00 | 375.388.872 | 97,29 | 2,71 | | | | |
| 7.1 | 2.22.08.5.01 | Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permusyawaratan | 133.725.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 133.725.000 | 100,00 | 126.761.772 | 94,79 | 5,21 | | | | |
| 7.1.1 | 2.22.08.5.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Keperintahan | 133.725.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 133.725.000 | 100,00 | 126.761.772 | 94,79 | 5,21 | | DIY | | <p>Masyarakat : * menyambut baik dengan adanya Perayaan Hari Jadi DIY yang dipromosikan setiap tanggal 13 Maret, mulai tahun depan 2024 akan ada perayaan Hari Jadi DIY</p> <p>https://bit.ly/testimoni_pemerintahnatum</p> <p>BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum</p> <p>1. Jumlah Dokumen Hasil Terlembaganya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Jumlah Dokumen Hasil Terlembaganya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Draft Raport tentang Penetapan Hari Jadi DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Pembentukan Tim Hari Jadi DIY 2. Menyampaikan surat permohonan personal tim kepada OPD terkait 3. Telah terlaksana Rapat Persiapan Penyusunan NA Hari Jadi DIY 2023 4. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Laporan Hari Jadi DIY pada Selasa, 9 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB - selesai di Ruang Rapat Saung Pepa, Gedung Keras Lantai 1, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Pada rapat tersebut Naskah Akademik dan Laporan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan oleh Tenaga Ahli, perwakilan Institute for Research and Empowerment (IRE), Sekretaris DPRD DIY, Biro Hukum Setda DIY, dan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 5. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Laporan Hari Jadi DIY pada Selasa, 29 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB - selesai yang dilakukan secara daring. Rapat diarahkan oleh Tim Tenaga Ahli dari BIR, Biro Hukum Setda DIY, Biro Organisasi Setda DIY, dan Kanwil Kementerian DIY dan Biro Tapem, dengan agenda Pembahasan dan penyetoran draft Naskah Akademik dan Draft Laporan Hari Jadi. 6. Menyampaikan Nota Dinas No. 120/0276 kepada Biro Hukum untuk menyampaikan konsep Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan dalam Keputusan Gubernur DIY nomor 96/Tim/2023, karena urgensi penyusunan Tim ini dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur. 8. Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi penyusunan Naskah Akademik dan Draft Laporan Hari Jadi DIY pada tanggal 22 September 2023 pukul 13.00 WIB - selesai di Ruang Rapat Saung Pepa, Gedung Keras Lantai 1, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 9. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Draft Naskah Akademik dan Laporan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 dan Yayasan Jati FLAMMA. 10. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Hari Jadi DIY pada tanggal 27 November 2023 di Ruang Saung Pepa Lantai 1, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 11. Penetapan Pembentukan Hari Jadi DIY pada tanggal 11 Desember 2023 di Hotel Millennium Jakarta dengan 2 narasumber dan Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perputakaan Nasional Republik Indonesia dan Direktur Produk Publikasi Daerah, Direktorat Jenderal Ombudsman 12. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Akademik dan Laporan Hari Jadi DIY pada hari Jumat, 22 Desember 2023 pukul 09.00 WIB - selesai di Ruang Rapat Saung Pepa, Gedung Keras Lantai 1, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya perubahan jadwal kegiatan yang telah direncanakan dari awal karena menyesuaikan pihak eksternal (jurnal) penyusunan Perubahan Proppempera di DPRD DIY), sehingga Rapat kerja yang sedianya akan dilaksanakan bulan Agustus tidak dapat terlaksana sehingga terdapat efisiensi beberapa komponen biaya diantaranya: - materi harian umum sebesar Rp1.275.000 - narasumber sebesar Rp2.000.000 (tidak memengaruhi capaian output, ditinjau melalui daring) <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dan Koordinasi antar OPD terkait dan Tenaga Ahli - Tersedianya anggaran dan peralatan kantor yang memadai |
| 7.2 | 2.22.08.5.06 | Sarana Prasarana Keistimewaan Uraian Kebudayaan | 252.125.700 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 252.125.700 | 100,00 | 248.627.100 | 98,61 | 1,39 | | | | |
| 7.2.1 | 2.22.08.5.06.03 | Pengadaan Sarana P-fasilitas dan Peranda Keistimewaan | 252.125.700 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 252.125.700 | 100,00 | 248.627.100 | 98,61 | 1,39 | | | | <p>Testimoni Lurah Selomartani</p> <p>https://youtu.be/7craifweds</p> <p>BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kurahan/Kelurahan dan Kabupaten/Kemantren</p> <p>1. Jumlah Sarana Publikasi dan Peranda Keistimewaan : 304 Unit dari 303 Unit</p> <p>2. Jumlah Papan Nama Keistimewaan : 1 Kelurahan dari 1 Kelurahan</p> <p>3. Kajian Standar Peranda Wilayah Keistimewaan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Penetapan Quick Response System (QRS) Code : 302 Kelurahan dari 302 Kelurahan</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Selomartani dengan hasil: <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan proposal kegiatan pembangunan Papan Peranda Keistimewaan oleh Kelurahan Selomartani; b. Proses Penetapan anggaran oleh BPA DIY; c. Proses pengalihan biaya dan pembangunan; d. Pelaksanaan hasil pembangunan Papan Peranda Keistimewaan. 2. Rapat Koordinasi terkait Peranda Keistimewaan pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Paguyuban Semar Sembogo sebanyak 25 orang dengan pembahasan terkaitlayat pemetaan kelembagaan kurahan atas ketersediaan sarana prasarana di tingkat Pedukuhan sebagai entitas terkecil dengan masyarakat. 3. Penyampaian Laporan pertanggungjawaban hasil BKK Papan peranda keistimewaan oleh Kelurahan Selomartani <p>- Koordinasi pelaksanaan pembangunan papan peranda keistimewaan dilakukan untuk memonitor pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, yaitu dengan asapan 301 kurahan dengan hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan pertanggungjawaban dengan koordinasi bersama TAPD (Peningkat dan BPKA) dan Pemerintah Kabupaten, sampai dengan 13 Februari hasil rekapitulasi terdapat perbedaan dengan catatan sebagai berikut: Biro Tapem ada 43 laporan belum masuk, BPKA ada 11, Peningkat ada 16, sehingga masih ada 77 kurahan yang kemudian dilaksanakan dengan komunikasi secara langsung dengan Kelurahan terkait. b. Koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan Balai Pedukuhan diarahkan 22 Kelurahan dan Garungbuddi pada tanggal 2 dan 6 Maret 2023 terkait koordinasi pemahaman teknis pelaksanaan pembangunan Balai pedukuhan. c. Koordinasi terkait persiapan pencarian rehabilitasi Balai pedukuhan di Kabupaten Gunungkidul dan penentuan nilai keistimewaan pada bangunan Balai pedukuhan pada tanggal 30 Maret 2023 dan 11 April 2023. d. Koordinasi terkait persiapan pencarian pemasangan QR Code Tahun 2023 pada tanggal 5 April 2023 <p>- Koordinasi untuk memfasilitasi tindaklanjut hasil kajian pembangunan kantor kurahan dan Balai pedukuhan pada Rabu, 10 Mei 2023 untuk membahas progres usulan rehab Balai pedukuhan dengan leading sector Dinas PPK ESDM DIY dan dimusyawahi akan dilakukan ke Kabupaten, dengan hasil: status tanah yang diulangi untuk direhab agar dikomati.</p> <p>- Koordinasi dan pemantauan progres pembangunan papan peranda keistimewaan pada Kelurahan Selomartani pada tanggal 7 Juni 2023 dengan hasil bahwa pembangunan sudah 100%, sementara laporan pertanggungjawaban masih dalam proses. Diarahkan kepada Kelurahan Selomartani untuk segera menyusun dengan format terlampir kepada Gubernur melalui Peningkat Keistimewaan dengan tembusan BPA DIY dan Biro Tapem serta kolengkan laporan disorot dokumentasi.</p> <p>- Koordinasi dan pemantauan progres pembangunan papan peranda keistimewaan pada Kelurahan Selomartani dengan progres pada tanggal 22 Juni Pemerintah Kabupaten Selomartani menyerahkan Laporan BKK Pembangunan Papan Peranda</p> |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan |
|-------|-----------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|--|--|--|---------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <p>Kostimewan</p> <p>2) Kajian Peranda Wilayah Kostimewan</p> <p>- Napa Koordinasi terkait pelaksanaan kajian pada tanggal 14 dan 24 Agustus 2022 melibatkan tim Tenaga Ahli dengan hasil sebagai langkah awal akan dilakukan observasi untuk mendapatkan informasi tambahan pada basis wilayah dan adanya ketidaksih analisis data, dan terakhir hasil kesimpulan akan diupload dalam forum yang lebih besar yaitu FGD pada tanggal 26 September</p> <p>- Terselenggaranya Kajian Peranda Wilayah Kostimewan di DIY</p> <p>3) Pemasangan Quick Response System (QRS Code) Pada Papan Peranda Kostimewan di 302 Kalurahan - Koordinasi Pemasangan Pemasangan Kebijakan Teknis Pembuatan dan Pemasangan QRS Code - Penyediaan Etno Dokumen Peranda pada web LSP - Pemasangan Quick Response System (QRS) Code pada papan peranda kostimewan di Kalurahan dengan progres s/d November Minggu pertama jumlah kalurahan Slemas 66 Kalurahan Gunungkidul 115 Kalurahan.</p> <p>- Pemasangan Quick Response System (QRS) Code di Papan Peranda Kostimewan di Kalurahan sejumlah 302 unit Kalurahan telah disediakan. Dengan Rincor: Kabupaten Gunungkidul : 116 Kalurahan Kabupaten Sleman: 66 Kalurahan Kabupaten Kulon Progo: 65 Kalurahan Kabupaten Bantul: 55 Kalurahan</p> <p>Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan berarti</p> <p>Faktor Pendukung: - Kesediaan Pemerintah Kalurahan Selamatan untuk memasang QRK Pembangunan Papan Peranda Kostimewan - Ketersediaan waktu Pemerintah Kalurahan Selamatan untuk melakukan pembangunan papan peranda kostimewan dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban - Komitmen tenaga ahli pada Kajian Peranda Wilayah dalam koordinasi - Kesiapan penyusunan dokumen pengandaan pemasangan QRS Code pada Papan Peranda Kostimewan di 302 Kalurahan - Terselenggaranya pemasangan Quick Response System (QRS) Code pada papan peranda kostimewan di 66 kalurahan Sleman - Terselenggaranya pemasangan Quick Response System (QRS) Code pada papan peranda kostimewan di 302 Kalurahan - Terselenggaranya Kajian Peranda Wilayah Kostimewan di DIY</p> | |
| 8 | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 608.366.100 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 608.366.100 | 100,00 | 597.667.602 | 98,24 | 1,76 | | | | |
| 8.1 | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21.719.900 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 21.719.900 | 100,00 | 21.378.900 | 98,43 | 1,57 | | | | |
| 8.1.1 | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.247.200 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 11.247.200 | 100,00 | 11.025.800 | 98,03 | 1,97 | <p>Biro Tata Pemerintahan Setda DIY</p> <p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p> | <p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 8 Dokumen dari 5 Dokumen</p> <p>2. Rencana Strategi Biro Tapem Tahun 2022-2027 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Rencana Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2024 : 2 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Rencana Kinerja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 - Subbagian Tata Usaha</p> <p>5. Tersusunnya ROKH : 2 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>6. Tersusunnya Perjanjian Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 : 2 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>7. Revisi Dokumen Restra 2022-2027</p> <p>8. Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024</p> <p>9. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV</p> <p>10. Pembuatan Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan untuk Tahun 2024 (RKA)</p> <p>11. Penormatan RKA 2024 oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah DIY</p> <p>12. Revisi Dokumen Restra 2022-2027</p> <p>13. Penyusunan rekrut rekrut 2024</p> <p>14. Penyelesaian rekrut rekrut 2022-2027</p> <p>15. Entry rencana bedang 2024 di Aplikasi SIPD baru</p> <p>16. Entry papu pasca rekrutings 2024 di SIPD</p> <p>17. Cetak Karcisngan Akta Keptira Tahun 2022-2027</p> <p>18. Entry rencana bedang 2024 di Aplikasi SIPD baru</p> <p>19. Identifikasi pagu RPMD Perubahan 2023</p> <p>20. RABPD Perubahan 2023</p> <p>21. RABPD Perubahan 2023</p> <p>22. Cetak rekrutings 2024</p> <p>23. Entry pengesahan pagu dan perubahan TUK di SIPD</p> <p>24. Cetak rekrutings 2023</p> <p>25. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV</p> <p>26. Tersusunnya RKA 2024 dan revisi RKA Das 2024</p> <p>27. Entry angkas 2024 di SIPD</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Efisiensi honor narasumber Forum Perangkat Daerah dibarengi PHD tidak bisa diikut honorarium, hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Entry rencana bedang pada Aplikasi SIPD yang baru perlu dipelajari secara mandiri. 3. Aplikasi SIPD yang masih dalam pengembangan menyebabkan entry memakan waktu. 4. SHD dalam SIPD baru belum bisa terkoneksi secara, sehingga menghambat proses entry.</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Koordinasi internal yang solid 2. Tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Keaktifan pegawai berkoordinasi dengan TAPD</p> | | |
| 8.1.2 | 4.01.01.1.01.02 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.472.700 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 10.472.700 | 100,00 | 10.353.100 | 98,86 | 1,14 | <p>Biro Tata Pemerintahan Setda DIY</p> <p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p> | <p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 14 Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Dokumen LK 3P : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Laporan monv bulanan/bulanan (LMP) : 13 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Penandatanganan di MoMarek mengakibatkan penyesuaian tertunda. 2. Terdapat tidak akur kinerja yang mengalami perubahan yang akibatnya mempengaruhi aktivitas sehingga mengurangi penyusunan anggaran</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens 3. Elos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselenggaranya laporan tepat waktu.</p> | | |
| 8.2 | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 43.724.600 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 43.724.600 | 100,00 | 43.592.200 | 99,70 | 0,30 | | | | |
| 8.2.1 | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengipon/Verifikasi Keuangan SKPD | 31.560.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 31.560.000 | 100,00 | 31.560.000 | 100,00 | 0,00 | <p>Biro Tata Pemerintahan Setda DIY</p> <p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p> | <p>1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengipon/Verifikasi Keuangan dan SKPD : 3 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD : 1 Jenis dari 1 Jenis</p> <p>3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD : 1 Jenis dari 1 Jenis</p> <p>4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD : 1 Jenis dari 1 Jenis</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Pengumpulan dokumen mendeaki akhir bulan cukup baru 2. Menu-menu dalam aplikasi SIPD penatausahaan keuangan belum semuanya karena dite-ditambah belum terintegrasi, sehingga Berbahara harus membuat laporan keuangan Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens.</p> | | |
| 8.2.1 | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengipon/Verifikasi Keuangan SKPD | 31.560.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 31.560.000 | 100,00 | 31.560.000 | 100,00 | 0,00 | <p>Biro Tata Pemerintahan Setda DIY</p> <p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p> | <p>1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum memotomikan tingkat kualitas yang Sangat baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023 hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p> <p>2. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum memotomikan tingkat kualitas yang Sangat baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023 hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara</p> | | |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan |
|-------|-----------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------|--|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2 | 4.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.644.400 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 4.644.400 | 100,00 | 4.560.800 | 98,20 | 1,80 | | Bagian Bina Pemerintahan Kabupaten/Kelurahan dan Kantor/Kemantren - Subbagian Tata Usaha | <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dan 1 Laporan 2. Laporan Keuangan Tahunan : 1 Laporan dan 1 Laporan | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi pengantar dengan pengelola BPHD biro, serta berdiskusi SKPD Terselenggaranya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 selesai Penutupan Laporan Keuangan Tahun 2022 Pengumpulan bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Pengantar akuntansi bersama Pengantar Barang melakukan konsolidasi untuk persiapan penyusunan laporan keuangan 2023 Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 Mempunculkan Data yang Diperlukan Untuk Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Menu-menu dalam aplikasi SKPD penatausahaan keuangan belum sempurna karena data-datanya belum terintegrasi, sehingga pegawai harus membuat laporan keuangan manual sebagai pemamping</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu Koordinasi cukup intens Elos kerja yang baik dan seluruh pegawai untuk mendukung terselenggaranya laporan tepat waktu. |
| 8.2.3 | 4.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 7.520.200 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 7.520.200 | 100,00 | 7.471.400 | 99,35 | 0,65 | | Bagian Bina Pemerintahan Kabupaten/Kelurahan dan Kantor/Kemantren - Subbagian Tata Usaha | <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD : 1 Laporan dan 4 Laporan 2. Laporan Keuangan Bulanan : 1 Laporan dan 1 Laporan 3. Laporan Keuangan Triwulanan : 1 Laporan dan 1 Laporan 4. Laporan Keuangan Semester : 1 Laporan dan 1 Laporan 5. Laporan Progress : 1 Laporan dan 1 Laporan | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan laporan sesuai dengan Bulan Desember Penyusunan LRA Bulan Desember Penyusunan DPA Pembuatan kebijakan di Mibomarket mempromosikan pembuatan laporan keuangan <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Debitas pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu</p> |
| 8.3 | 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 11.400.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 11.400.000 | 100,00 | 11.400.000 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| 8.3.1 | 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 11.400.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 11.400.000 | 100,00 | 11.400.000 | 100,00 | 0,00 | | Bagian Bina Pemerintahan Kabupaten/Kelurahan dan Kantor/Kemantren - Subbagian Tata Usaha | <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dan 1 Laporan 2. Laporan Ases SKPD : 1 Laporan dan 1 Laporan | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan barang Pembuatan kartu pemegang BMD Pembayaran honorarium petugas barang milik daerah sampai dengan triwulan 1 Pengajuan barang untuk dihapus Konversi kendaraan dinas roda dua perubahan balok menjadi menjadi kendaraan listrik roda dua Pembayaran honorarium petugas barang milik daerah sampai dengan triwulan 3 Entry Perincinan persusnuran bulan Desember Cetak laporan aset yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan stock opname persediaan akhir tahun Cetak laporan persediaan yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Banyak kondisi barang yang sudah mulai rusak (seperti komputer, mesin, printer, dll) tetapi tidak diizinkan untuk pengaduan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Debitas pegawai untuk tetap menjalankan tugasnya secara efektif dan menyediakan tepat waktu</p> |
| 8.4 | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 363.171.900 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 363.171.900 | 100,00 | 356.886.867 | 98,27 | 1,73 | | | | |
| 8.4.1 | 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor | 17.531.600 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 17.531.600 | 100,00 | 12.556.667 | 71,62 | 28,38 | | Bagian Bina Pemerintahan Kabupaten/Kelurahan dan Kantor/Kemantren - Subbagian Tata Usaha | <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/Kantor yang Didisain : 1 Paket dan 1 Paket 2. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 1 Paket dan 1 Paket | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan peralatan teknik dan pemeliharaan tenaga biro terintegrasi dengan baik sampai dengan TW 4 Pengalangan kembali akun zoom biro untuk mendukung kelancaran kegiatan telekomodir dengan baik sampai dengan TW 4 Penyediaan dan pemasangan alat penerangan pada ruang kerja terdistribusi dengan baik sampai dengan TW 4 Lampu sorot mati, perlu pembaruan jaringan listrik keseluruhan gedung Unit 2 Efisiensi harga satuan akun zoom jauh di bawah DPA <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Kesiap-siagaan pegawai untuk menghadapi permasalahan dan mengorganisir studi</p> |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan |
|-------|-----------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.2 | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor | 32.203.400 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 32.203.400 | 100,00 | 31.656.300 | 98,30 | 1,70 | <p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p> | <p>1. Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket 2. Alat Tulis Kantor : 1 Paket dari 1 Paket 3. Tabung Pemadam Kebakaran : 1 Paket dari 1 Paket</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan SKPD 2. Mengalokasikan peralatan dan perlengkapan kantor Bulan Desember untuk mendukung kelancaran kegiatan 3. Memeriksa toner untuk cartridge printer demi kelancaran kegiatan biro 4. Penyetelan ATK s.d. bulan Desember</p> <p>Faktor Penghambat: Beberapa barang belum tersedia di Mbzmarket sehingga pembelian dilakukan secara manual (offline)</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Kecepatan rekanan dalam merespon kebutuhan biro 2. Dedikasi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu</p> | |
| 8.4.3 | 4.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.984.900 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 6.984.900 | 100,00 | 6.984.900 | 100,00 | 0,00 | <p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p> | <p>1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket 2. Peralatan kebersihan dan bahan pemertahan : 3 Paket dari 1 Paket</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggantian SKPD s.d. Bulan Desember 2. Mengalokasikan barang cetakan dan penggantian s.d. Bulan Desember</p> <p>Faktor Penghambat: Beberapa barang belum tersedia di Mbzmarket.co.id sehingga pembelian dilakukan secara manual (offline)</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Kecepatan rekanan untuk merespon dan mengantarkan barang pesanan 2. Tanggung jawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu</p> | |
| 8.4.4 | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.489.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 21.489.000 | 100,00 | 21.489.000 | 100,00 | 0,00 | <p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p> | <p>1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket 2. Barang cetakan : 1 Paket dari 1 Paket 3. Penggandaan : 1 Paket dari 1 Paket</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggantian SKPD s.d. Bulan Desember 2. Mengalokasikan kebutuhan bahan bacaan pada SKPD s.d. Bulan Desember 3. Menyediakan bahan bacaan surat kabar harian untuk memberikan informasi yang cukup dalam rangka mendukung kinerja SKPD s.d. Bulan Desember</p> <p>Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kerja sama antar pegawai yang solid 2. Kecepatan penyedia dalam merespon kebutuhan biro</p> | |
| 8.4.5 | 4.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perbaruan Perundang-undangan | 11.160.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 11.160.000 | 100,00 | 11.160.000 | 100,00 | 0,00 | <p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p> | <p>1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Bahan bacaan Jasa Prat : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Bahan bacaan Kebutuhan Rakyat : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan bahan bacaan pada SKPD s.d. Bulan Desember 2. Menyediakan bahan bacaan surat kabar harian untuk memberikan informasi yang cukup dalam rangka mendukung kinerja SKPD s.d. Bulan Desember</p> <p>Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kerja sama antar pegawai yang solid 2. Kecepatan penyedia dalam merespon kebutuhan biro</p> | |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan |
|-------|-----------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|----------------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.6 | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 223.803.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 223.803.000 | 100,00 | 223.413.000 | 99,83 | 0,17 | https://drive.google.com/file/d/1nLBAHAW7IbAFJ3rQcC9990RrPF3jy/view?usp=sharing | Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha | 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan konsultasi dan koordinasi : 1 Laporan dari 1 Laporan | | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah sampai dengan Bulan Desember. 2. Target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mengganggu ketercapaian output karena belum ada koordinasi dilaksanakan menggunakan rapat-rapat kecil secara intens. <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi perjalanan dinas, harga di bawah DPA. 2. Masih menunggu penentuan APBD Perubahan 2023 dan kebijakan reforesing karena arahan dari TAPD menunggu evaluasi diorg. Namun target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mengganggu ketercapaian output karena sudah dilaksanakan melalui rapat-rapat kecil secara intens. |
| 8.4.7 | 4.01.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 50.000.000 | 100,00 | 49.627.000 | 99,25 | 0,75 | https://drive.google.com/file/d/1M0MDU0UayShehQjWVhVngC150Yi_Zu/view?usp=sharing | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | 1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Penetapan Website Tahun 2023 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY : 1 Website dari 1 Website | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kebutuhan pemeliharaan website: Biro 2. Koordinasi dengan pihak ketiga melalui asan terkait pemeliharaan dan pengembangan website: Biro Tapem 3. Tercapainya pemeliharaan website: Biro Tapem <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya efisiensi LS 2. Tidak ada hambatan yang berarti <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Penguasaan teknologi (zoom) untuk melakukan koordinasi yang cukup intens. 3. Eros kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesainya laporan tepat waktu. | |
| 8.5 | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Pemungutan Pemeliharaan Daerah | 7.985.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 7.985.000 | 100,00 | 4.708.635 | 58,97 | 41,03 | | | | | |
| 8.5.1 | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.985.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 7.985.000 | 100,00 | 4.708.635 | 58,97 | 41,03 | https://drive.google.com/file/d/1nLBAHAW7IbAFJ3rQcC9990RrPF3jy/view?usp=sharing | Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha | 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan penyediaan jasa surat menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetik/mengetik kebutuhan materi pada SKPD s.d. Bulan Desember 2. Mengetik/mengetik kebutuhan materi untuk memenuhi kebutuhan SKPD s.d. Bulan Desember <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya efisiensi paket pengiriman karena program anggaran e-KIP sudah cukup dan terlaksana dengan baik 2. Tidak ada hambatan yang berarti <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pegawai untuk memanfaatkan media sesuai dengan peruntukannya | |
| 8.6 | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pemeliharaan Daerah | 160.364.700 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 160.364.700 | 100,00 | 159.701.000 | 99,59 | 0,41 | | | | | |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Realisasi (%) | Devisi | Testimoni Pemenerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan |
|-------|-----------------|--|-------------|--------|-----------|--------|-------------|------------|----------------|---------------|--------|--|---|--|--|----------|---------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Devisi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | | | | | | | | |
| 8.6.1 | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 177.344.300 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 177.344.300 | 100,00 | 175.453.300 | 98,88 | 1,12 | <p>Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,4. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atau hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1nL3BAHAW70zAF3RQcQD9990RrPFcu/view?usp=sharing</p> | <p>Bagian Bina Pemerintahan Sekretariat Daerah/Kelurahan dan Kapuswank/Mantroran - Subbagian Tata Usaha</p> | <p>1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibersihkan/Polish - 1 Unit dari 1 Unit 2. Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 : 1 Unit dari 1 Unit</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan s.d. Bulan Desember 2. Pemeliharaan servis kendaraan dinas jabatan s.d. Bulan Desember 3. Mengidentifikasi kebutuhan untuk mencuci kendaraan dinas jabatan s.d. Bulan Desember Faktor Penghambat: 1. Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kerjasama antarpegawai yang solid 2. Ketetapan pegawai untuk merawat kendaraan</p> | | |
| 8.6.2 | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 105.538.100 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 105.538.100 | 100,00 | 105.127.100 | 99,61 | 0,39 | <p>Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,4. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atau hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1nL3BAHAW70zAF3RQcQD9990RrPFcu/view?usp=sharing</p> | <p>Bagian Bina Pemerintahan Sekretariat Daerah/Kelurahan dan Kapuswank/Mantroran - Subbagian Tata Usaha</p> | <p>1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibersihkan/Polish dan Perawatannya : 11 Unit dari 11 Unit 2. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 : 4 Unit dari 4 Unit 3. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 : 7 Unit dari 7 Unit</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional 2. Pemeliharaan servis kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran aktivitas SKPD s.d. Bulan Desember 3. Mengidentifikasi bahan bakar minyak dalam bentuk voucher s.d. Bulan Desember Faktor Penghambat: 1. Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Kendaraan operasional untuk memanfaatkan kendaraan dinas operasional sesuai peruntukannya</p> | | |
| 8.6.3 | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya | 37.082.300 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 37.082.300 | 100,00 | 37.028.600 | 99,86 | 0,14 | <p>Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,4. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atau hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p> <p>https://bit.ly/testimoni_pemerintahannum</p> | <p>Bagian Bina Pemerintahan Sekretariat Daerah/Kelurahan dan Kapuswank/Mantroran - Subbagian Tata Usaha</p> | <p>1. Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 5 Unit dari 3 Unit 2. Air Conditioner : 1 Jenis dari 1 Jenis 3. Komputer : 3 Jenis dari 1 Jenis 4. LCD Projector : 1 Jenis dari 1 Jenis</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan perlatan dan mesin pada SKPD s.d. Bulan Desember 2. Pemeliharaan Perlatan Komputer (garni hardisk, penambahan memori, update aplikasi, dan lain sebagainya) s.d. Bulan Desember 3. Pemeliharaan laptop s.d. Bulan Desember 4. Pemeliharaan Air Conditioner (air filter, penindakan posisi AC, dan penurunan suhu AC) yang sudah rusak) s.d. Bulan Desember Faktor Penghambat: 1. Bahan ini tidak dituangkan pengadangan perlatan, pemeliharaan AC perlu penanganan yang baru 2. Gangguan listrik mengakibatkan AC kotor dan berbau 3. Aliran listrik di unit 2 sering trouble dan tiba-tiba mati. Faktor Pendukung: 1. Keaktifan pegawai dalam melaporkan kerusakan sehingga dapat ditangani dengan cepat pada 2. Penanganan keluhan yang responsif</p> | | |
| 9 | 4.01.03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 454.799.300 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 454.799.300 | 100,00 | 437.310.366 | 96,15 | 3,85 | | | | | | |
| 9.1 | 4.01.03.1.01 | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | 189.099.900 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 189.099.900 | 100,00 | 174.360.250 | 92,21 | 7,79 | | | | | | |
| 9.1.1 | 4.01.03.1.01.02 | Facilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 147.100.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 147.100.000 | 100,00 | 132.580.550 | 90,13 | 9,87 | <p>Pelaksanaan tugas Nyawiji yang Pesta Demokrasi oleh entitas.dra "Malamunwan Ngangsa Dalam Sri Jalan Kemenggu Buremo", S. Semoga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, lancar dan sukses. Yogyakarta tetap kekal.</p> <p>https://bit.ly/testimoni_pemerintahannum</p> | <p>BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum</p> | <p>1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum : 6 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Berkas usulan pemberitahuan, pengangkatan anggota DPRD pengangkatan antar wakil - 4 usulan SK dari 3 usulan SK (Kabupaten Kuloprogo dan Kota Yogyakarta) : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. Laporan hasil Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Berkas usulan pemberitahuan dan pengantaran antar wakil anggota DPRD : 1. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/04261 tanggal 30 Desember 2022 tentang permohonan Permisian Perseorangan dan Pengangkatan Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan ditetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 7/KEP/2023 tentang Perseorangan dan Pengangkatan Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Saundra Suprpto 2. tanggal 5 Januari 2023 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 13/KEP/2023 tentang Perseorangan Pengangkatan Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Saundra Suprpto 3. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/04159 tanggal 31 Januari tentang Permohonan Perseorangan dan Pengangkatan Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Saundra S.H. Selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan ditetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 10/KEP/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Perseorangan dan Pengangkatan Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Saundra S.H. 4. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/04048 tanggal 9 Januari 2023 tentang Permohonan Perseorangan dan Pengangkatan Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Saundra S.H. S.Pd pada tanggal 1 Maret 2023. 4. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/04048 tanggal 9 Januari 2023 tentang Permohonan Perseorangan dan Pengangkatan Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Saundra S.H. S.Pd pada tanggal 1 Maret 2023. 4. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/04048 tanggal 9 Januari 2023 tentang Permohonan Perseorangan dan Pengangkatan Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Saundra S.H. S.Pd pada tanggal 1 Maret 2023. 4. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/04048 tanggal 9 Januari 2023 tentang Permohonan Perseorangan dan Pengangkatan Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Saundra S.H. S.Pd pada tanggal 1 Maret 2023.</p> | | |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | | Keuangan | | | | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan | |
|----|------|-----------------------------------|------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------|--------|--------------------------|----------|---------------------------|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>dinandatangani dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 19/10/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan Dokumen Pemberitahuan Antarwaku, Penggantian Antarwaku, dan Pemberitahuan Sementara Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota</p> <p>5. Rapat-rapat koordinasi dalam rangka verifikasi kelengkapan Dokumen Usulan Pemberitahuan dan Penggantian Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota</p> <p>6. Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor: 177/7462 tanggal 3 Juli 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberitahuan dan Penggantian Anggota DPRD DIY</p> <p>Selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan ditemukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4 - 1107 Tahun 2023 tentang peresmian Pemberitahuan Anggota DPRD DIY, tanggal 31 Juli 2023 atas nama saudara Suparno, S.H karena meninggal dunia, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4 - 1135 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaku Anggota DPRD DIY atas nama saudara Christine Anik Rahmatungrah, tanggal 3 Agustus 2023.</p> <p>7. Surat Gubernur DIY Kepada Mendagri Nomor: 177/7463 tanggal 3 Juli 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberitahuan dan Penggantian Antarwaku Anggota DPRD DIY. Selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan ditemukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-1188 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberitahuan Anggota DPRD DIY atas nama saudara drs. H. Henam Solobidjo, HMA, tanggal 15 Agustus 2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-1189 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaku Anggota DPRD DIY atas nama saudara Mulyono, SE, MEK, tanggal 15 Agustus 2023.</p> <p>8. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/0236 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberitahuan dan Penggantian Antarwaku Anggota DPRD Kabupaten/Bupati Masa Jabatan 2019-2024. Selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan ditemukannya Keputusan Gubernur DIY Nomor 266/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberitahuan Antarwaku Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama saudara H.R. Ichwan Imaning Mardiyanto, S.E., tanggal 15 Agustus 2023 dari Partai Amanat Nasional dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 265/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaku Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Patrice Kayanti, tanggal 21 Agustus 2023.</p> <p>9. Surat Gubernur DIY Kepada Mendagri Nomor: 177/9790 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberitahuan dan Penggantian Antarwaku Pimpinan DPRD DIY saudara Suhawanto, ST, dipantikan oleh saudara Ir. Arno</p> <p>10. Surat Gubernur DIY Kepada Mendagri Nomor: 177/1036 tanggal 13 September 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberitahuan dan Penggantian Antarwaku Anggota DPRD DIY saudara H. Ahmad Bahajj Razi, B. Sc., M.A. dipantikan oleh saudara Suwadi Lestari.</p> <p>11. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/0340 tanggal 1 November 2023 tentang Usulan Peresmian Pemberitahuan dan Penggantian Antarwaku Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan ditemukannya Keputusan Gubernur DIY Nomor: 375/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberitahuan Antarwaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama H. Suryanto, S.E tanggal 10 November 2023 dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 376/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Eli Sertoso, tanggal 13 November 2023.</p> <p>Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat-rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024, Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Kamis, 9 Februari 2023 pukul 09.00-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kretna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Narasumber : Tim Agus Icharta, S.H (Bawaslu Kota Yogyakarta) dan Sri Nurhayati (KPU Kota Yogyakarta) S.S. Peserta : PKK se-Kemantren Gondokusuman dan Donorejo, Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kretna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Narasumber : Hidayat Widodo (KPU Kota Yogyakarta) dan Noor Hanry Anyosmidro S.Sn, HMA (Bawaslu Kota Yogyakarta) serta Kaputera Pengantjuti (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY), Peserta : Tim Penggerak PKK Kemantren Kraton, Mangrove, dan Mangrove sukumati 60 orang, Sosialisasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Rabu, 15 Februari 2023 pukul 09.30-selesai di Kantor Kapewon Pengang, Gunungkidul. Narasumber - Heri Dwi Hartono, S.H (Korwas A DPRD DIY) ; Supriy, S.Sos (KPU Kab. Gunungkidul) ; Tri Ameyanto (Bawaslu Kab. Gunungkidul); Peserta : PKK se-Kapewon Pengang. Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Selasa, 21 Februari 2023 pukul 09.00 -selesai di Kantor Kapewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Narasumber : Badi Muband, SH (Korwas KPU Kab. Kulon Progo) Wagman ALH, (Bawaslu Kab. Kulon Progo) dan Anggota Komisi A DPRD DIY Nanda Kertika Hadji, S.T. Peserta : PKK se-Kapewon Lendah. Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 09.00 WIB-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Narasumber: Eko Sumarto (Korwas Komisi A DPRD DIY); Erni (KPU Kota Yogyakarta); dan Muhammad Mublisin (Bawaslu Kota Yogyakarta); serta peserta dari PKK se-Kemantren Widyadipati, Pakuwati, Ngemplan, dan Gondomanan. Sosialisasi Tahapan pemilu Tahun 2024 pada Jumat 3 Maret 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Narasumber Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Sumarto; Hendrik Karmawan (Ketua KPU DIY) ; dan Drs. Muhammad Najih, M.S. (Bawaslu DIY) Peserta : TP-PKK se-Kemantren Tegayrejo, Jetis, dan Gondongrejo Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Selasa 7 Maret 2023 pukul 09.00-selesai di Kantor Kapewon Godean, Kabupaten Sleman. Peserta : TP PKK se-Kapewon Godean dengan narasumber anggota Sudaryanto, S.H (Komisi A DPRD DIY) ; Ahmad Shidiq, S.Th.L., M.Hum (KPU DIY) ; serta Drs. Mohammad Najib, M.S. (Bawaslu DIY) Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada 9 Maret 2023 pukul 09.00-selesai di Kantor Kapewon Depok, Kabupaten Sleman. Narasumber Heri Dwi Hartono, S.H. (DPRD DIY), Assano Muband (KPU Kab. Sleman) ; dan Vici Herawati, S.P (Bawaslu Kab. Sleman) Peserta TP PKK se-Kapewon Depok. Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Rabu 15 April 2023 pukul 09.00-selesai di Kapewon Sewon, Kabupaten Bantul - Narasumber KPHI. Puradarmasari, SE, MEd (Komisi A DPRD DIY) ; Didi Sidi Nugroho, S.Ant (KPU Kab. Bantul) ; Satriyowati, SH, M, M.Pi (Bawaslu DIY) . Peserta : TP PKK se-Kapewon Sewon Bantul Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Jumat 17 April 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kretna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan. Peserta : TP PKK se-Kemantren Umbulharjo dan Kotagede, untuk narasumber Eko Sumarto S.H.S (Komisi A DPRD DIY), Wawan Budiyanto, S.Ag, M.S; (KPU DIY) Herina, S.H (Bawaslu Kab. Bantul) Rapat Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Jajiga Nunging Ing Penta Demokasi pada tanggal 3 Oktober 2023, tanggal 11 Oktober 2023, dan tanggal 27 Oktober 2023. <p>Pemilihan Serentak Pilkada) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Bentuk Khusus Keunggulan Pelaksanaan Pilkada tahun 2024, Pengumpulan bahan stat Nomor 270/02191 tanggal 31 Juli 2023 Hal : Bantuan Keuangan Khusus Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten/Kota se-DIY. Rapat Kerja Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu, 23 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja Lantai III, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Dalam rapat kerja ini terdapat tiga narasumber yaitu: Kepala Saldidktorat Fasilitas Pemilu dan Pengembangan Demokrasi pada Direktorat Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri atas nama Bapak Soepan Setiadi, SH, M.Si, Analisis Kebijakan Abdi Muda Wilpoh 1 Direktorat KPDH dan DPRD Dinas Operasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak R. Hendy Nur Kusuma, STP, MA, dan Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Bapak Bardi Dwidia Kumada, Ph.D. Peserta rapat dari OPD pengempu / memanageri Fasilitas Pilkada Tahun 2024. Surat Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-DIY, Nomor 390/83 tanggal 30 agustus 2023 Hal : Desk Pilkada Kabupaten/Kota di DIY Tahap Staff kepada Sekretaris Daerah DIY Nomor: 270/02191 tanggal 31 Juli 2023 Hal: Bantuan Keuangan Khusus Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten/Kota se-DIY Perjalanan dinas ke Kabupaten Sleman dalam rangka Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 8 Desember 2023 Perjalanan dinas ke Kabupaten Bantul dalam rangka Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 7 Desember 2023 Perjalanan dinas ke Kabupaten Kulon Progo dalam rangka Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 14 Desember 2023 <p>Pelantikan PJ Bupati - PJ Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Persiapan Pelelantikan Perjabat Bupati Kulon Progo dan PJ. Wali Kota Yogyakarta dan PJ. Ketua TP PKK Kabupaten/Kota. Gab Bersih Pelelantikan Perjabat Bupati Kulon Progo dan Pelelantikan Wali Kota Yogyakarta sebagai Gab Bersih Pelelantikan Perjabat Ketua TP PKK Kabupaten/Kota pada Minggu, 21 Mei 2023 pukul 13.00-selesai di Bangsal Keppathan dan Gedung Praasasora Pelelantikan Perjabat Bupati Kulon Progo dan Perjabat Wali Kota Yogyakarta oleh Bapak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 12.00-selesai di Bangsal Keppathan Pelelantikan Perjabat Ketua TP PKK Kabupaten Kulon Progo dan TP PKK Kota Yogyakarta oleh Wakil Ketua I TP PKK DIY GDBRay Fauz Alams pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 15.00-selesai di Gedung Praasasora. <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Efisiensi dari Penyelenggaraan Sosialisasi sebesar Rp.2.000.000 karena narasumber yang tidak hadir 0-0 (Rp.2.000.000). Efisiensi dari penyelenggaraan pelelantikan sebesar Rp.12.297.450 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Efisiensi angsaran backdrop Pelelantikan PJ Bupati dan |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan |
|-------|-----------------|-----------------------------------|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------|---|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>Wali Kota dan Rombongan 1 TP PKK Kabupaten/Kota Rp.700.000,- karena harga pasir lebih tinggi dari anggaran</p> <p>DPA sehingga difasilitasi oleh Biro LHP,</p> <p>b. Efisiensi Honor Rohanwan Rp.400.000 (hanya Agena Idem saja),</p> <p>c. efisiensi anggaran Paksiwa Dinas Ulapara Rp.4.575.450 (harga dibawah DPA)</p> <p>d. Efisiensi anggaran hembung SK Rp.142.000 (harga pasar dibawah harga DPA)</p> <p>e. Efisiensi Cetak (mater) Rp.180.000 (karena nersumber 2 Di kota hulu)</p> <p>3. Efisiensi anggaran ATK sebesar Rp.39.700 (harga pasar dibawah harga DPA)</p> <p>4. Efisiensi perjalanan dinas daerah Rp100.000 (1 OH tidak dapat mengikuti perjalan)</p> <p>5. Efisiensi ATK sebesar 35.900</p> <p>6. Menunggu penetapan APBD Perubahan 2023 dan kebijakan refinansing karena arahan dari DPRD kegiatan ini tidak boleh dilaksanakan karena masih menunggu evaluasi dari, namun target output sudah tercapai, hal tersebut tidak mempengaruhi ketercapaian output karena dapat dilaksanakan melalui rapat-rapat kecil secara intens.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Faktor Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik dengan pembaharutan dan stakeholder terkait. Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana kantor. |
| 9.1.2 | 4.01.03.1.01.03 | Fasilitasi Peta Wilayah | 41.999.900 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 41.999.900 | 100,00 | 41.779.700 | 99,48 | 0,52 | | BRNO TATA PEMERINTAHAN Bagian Pemerintahan Umum | <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peta Wilayah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Laporan penyelenggaraan pembangunan di wilayah perbatasan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen <p>testimoni penyelenggaraan pembangunan wilayah perbatasan DIY oleh Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fisip UGM</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1N_65z2G6N7z3yV1N8z2q77A4DEE?usp=sharing</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya jadwal rencana pelaksanaan kegiatan Tersusunnya rapat koordinasi internal dan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Tertekannya rapat koordinasi finalisasi Raperub Pengkoordinasian pembangunan wilayah perbatasan Tertekannya rapat koordinasi terkait pembatasan penyusunan Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan DIY tahun 2023 Tersampainya surat permohonan personal Tim Pembangunan wilayah perbatasan DIY tahun 2023 Tertekannya koordinasi dan persiapan penyelesaian pembangunan wilayah perbatasan di Kab. Sleman dan Kab. Gunungkidul Tertekannya Raker Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY Tersampainya data identifikasi permasalahan di kawasan perbatasan provinsi/kabupaten/kota Selenggaranya kegiatan 1A Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Perbatasan dengan SPK 027/01/21 dan 027/01/22 tanggal 24 Mei 2023 Identifikasi permasalahan terbanyak di wilayah perbatasan antara lain terkait sarana dan prasarana, Rumah tinggal Layak Huni, Kesehatan dan juga lingkungan Selanjutnya arah pembangunan di wilayah perbatasan akan berfokus pada peningkatan kualitas jalan serta peningkatan kapasitas SDY Perencanaan DIY telah melaksanakan berbagai upaya media program dan kegiatan untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya antar kabupaten/kota. Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah DIY meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni baru Rehabilitasi dan peningkatan kualitas jalan Operasi pemeliharaan rutin saluran drainase Sosialisasi P4GN Pelatihan keterampilan Peningkatan pelayanan di Puskesmas pembantu Peningkatan pelayanan kesehatan desa Peningkatan SPAM Pedesaan Pembinaan terhadap anak sekolah Edukasi kesehatan ke masyarakat <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Data potensi permasalahan perbatasan dari Bappeda Kabupaten/Kota belum disampaikan tepat waktu</p> <p>Terdapat efisiensi sebesar Rp. 220.200 atau kurang cover 65.000, dalam komputer Rp. 35.200 dan honor narasumber Rp. 100.000</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Kesungguhan yang solid dan koordinasi yang baik antara OPD Pemda DIY</p> | |
| 9.2 | 4.01.03.1.02 | Pelaksanaan Otonomi Daerah | 75.000.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 75.000.000 | 100,00 | 72.909.000 | 97,21 | 2,79 | | | | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan LPPD DIY Tahun 2022 Penyusunan Tim Pelaporan LPPD Tahun 2022 Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2022 Penyusunan LPPD Tahun 2022 Desk Verifikasi Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2022 Revisi Penyusunan LPPD (Rancangan) Tahun 2022 Tindak Lanjut Revisi LPPD 2022 Entri data dan dokumen pendukung dalam aplikasi SLPPD R/LPPD Pengumpulan bahan/bukti dukung pemutakhiran IKK LPPD 2022 Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi LPPD Kab/Kota Tahun 2022 Koordinasi Pelaksanaan Uji Petik EPPD Tahun 2023 oleh Tim Nasional berdasarkan LPPD Tahun 2022 Entry meeting pelaksanaan uji petik terhadap EPPD Tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022 Uji Petik terhadap EPPD Tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022 dan Tindak Lanjutnya Pemutakhiran IKK LPPD Tahun 2022 dalam SLPPD Koordinasi Pemutakhiran IKK Asimetri DIY LPPD 2023 Usulan IKK Asimetri DIY LPPD 2023 <p>Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Tim Penerapan SPM DIY Pengumpulan data Laporan Penerapan SPM DIY Tahun 2022 Entri data laporan SPM Pemantauan Laporan SPM DIY Tahun 2022 Verifikasi data laporan penerapan SPM DIY Tahun 2022 Sinkronisasi data SPM 2022 dengan data LPPD 2022 Manajemen dan Pelaporan SPM DIY Tahun 2023 Pelaporan SPM TW 1 Tahun 2023 Evaluasi SPM pada Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota se-DIY Tahun 2022 Penyusunan dan Pembahasan Draft Raperub SPM DIY Pengganti Perpu 11/2020 Pemayunan Draft Raperub SPM Pengganti Perpu 11/2020 ke Biro Hukum Pelaporan SPM TW 2 Tahun 2023 dalam aplikasi e-SPM Penyusunan Perubahan Personal Tim SPM Surat Penyusunan RKT Dinas Sosial-OB Global Evaluasi SPM Perubahan APBD Tahun 2023 Semua Kab/Kota di DIY Pelaporan SPM TW 3 Tahun 2023 dalam aplikasi eSPM IGD Pemantauan dan evaluasi SPM Pengisian kuisioner Manover SPM Tahun 2023 Manover dan Pelaporan SPM Tahun 2023 Tindak Lanjut Permasalahan Pencapaian Target SPM Pelaporan Umum (Air Minum dan Air Limbah) Kabupaten/Kota se-DIY Tahun ditetapkan dan diundangkannya Perpu Nomor 76/2023 tentang Indikasi Perencanaan SPM Evaluasi anggaran SPM pada APBD 2024 semua Kab/Kota di DIY Persiapan Pelaporan TW IV dan Laporan SPM Tahun 2023 <p>Penyenggaraan Pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Nasabah Pengumuman Informasi (Keterbukaan Informasi Publik) LPPD DIY Tahun 2017 - 2022 Rapat Pengambilan Aset Jalan dan Kemeteran PURR RI kepada Pemda DIY dan dari Pemda DIY kepada Kem. PURR RI Pemantauan data sarana dan prasarana jalan (BND) yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jating DIY di Semarang Pemantauan data (soft copy) kelengkapan data (ortofoto, dll) sarana dan prasarana jalan (BND) yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jating DIY di Semarang dan sebaliknya untuk diverifikasi Pemantauan permasalahan aset Sumber Daya Air (SDA) UPAH-ESDA yang akan diminta oleh BBN/OO Verifikasi aset jalan yang akan diserahkan dari KemertPURA kepada Pemda DIY dengan skema hibah <p>Faktor Penghambat:</p> <p>LPPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat capaian-capaian yang belum optimal dikarenakan IKK LPPD masih ada yang belum menjadi target kinerja OPD yang disupport dengan anggaran yang memadai; Perbedaan persepsi terkait definisi IKK; Terdapat efisiensi at cost persampahan diatas nersumber dan honor narsumber (langganan eselon II yg hadir eselon III) dan ATK. <p>SPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data yang dihasilkan pada Pendataan SPM berdasarkan Permendagri 59/2021 belum lengkap. Update data Tahun 2022 sedang penyidikan, kesehatan dan sosial belum dapat disajikan oleh OPD anggarans; Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan SPM. Pemenuhan anggaran SPM dibandingkan dengan anggaran untuk pelayanan dasar maupun APBD masih sangat kecil padahal SPM adalah isi dari usrah pelayanan dasar. <p>Faktor Pendukung:</p> <p>LPPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya komitmen dari pimpinan untuk Pelaporan Pemda DIY Tahun 2022 antara lain di LPPD, LKIP, LAKIP, LKUP dan SPM; Penyusunan anggaran dengan Pemerintah Pusat dan pihak terkait (Inspektoriat maupun OPD) terkait definisi IKK; <p>SPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya pelaporan trivulanan pada aplikasi eSPM; Pelaporan SPM Tahun 2022 telah menggunakan format sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021; Disekalikannya Dana Kemitraan dapat digunakan untuk mendanai/ supporting pemenuhan SPM; Koordinasi intensif Tim SPM DIY dengan Tim SPM Kab/Kota dan Sebesar SPM Pusat; Telah disampaikan Surat Gubernur kepada OPD Pengantar SPM di Pemda DIY terkait Pelaporan Trivulanan dan Pendataan SPM (Update) per Tahun 2023 Adanya inspektoriat di Internal Pemda DIY dan Kab/Kota se-DIY terkait permasalahan pengenteng pelaporan SPM pada Aplikasi eSPM Manover SPM tidak hanya dilakukan dengan anggaran dari Biro Tazem tetapi juga dalam forum evaluasi Perda Pertanggungjawaban APBD/RAPBD/RAPAS di BPKA. Manover juga dilaksanakan melalui anggaran Dekonsentrasi GAPP yang dituangkan oleh Inspektoriat maupun dari keanggotaan Tim SPM lainnya |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------|--------------------------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | | | | | | |
| 9.3 | 4.01.03.1.03 | Facilitasi Kerja Sama Daerah | 190.699.400 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 190.699.400 | 100,00 | 190.041.116 | 99,65 | 0,35 | | | | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan Naskah Perjanjian Kerjasama - Dalam Regeri : <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Tim TKKSD sebagai pendukung kelancaran penyusunan naskah kerjasama 2. Melakukan rapat koordinasi penyusunan naskah kerjasama bulan Januari - Pelaksanaan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama bulan Regeri : <ul style="list-style-type: none"> 1. Rabu, 1-2-2023, Pembahasan naskah PKS antara Pemda DIY dengan PT. Bank Mandiri 2. Kamis, 2-2-2023, Pembahasan KSA antara Pemda DIY dengan Universitas Sebelas Maret 3. Selasa, 14-2-2023, Pembahasan usulan naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan STPKat Santo Fransiskus Asisi Semarang 4. Selasa, 21-2-2023, Pembahasan naskah PKS antara DPRD DIY dengan DPRK Kabupaten Jember 5. Senin, 24-2-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan RS Sardjito dik 6. Rabu, 12-3-2023, Pembahasan tindak lanjut draf KAK TMA Regional Piyungan 7. Selasa, 9-5-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan Pemda DIY 8. Jumat, 12-5-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan Pemda DIY 9. Selasa, 6-6-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Perkuwina dengan Pemda DIY 10. Jumat, 9-6-2023, Rapat koordinasi jejaring pengawasaan 11. Jumat, 7-7-2023, Persiapan penandatanganan naskah kerja sama RUMAH SAKIT jejaring pengawasaan 12. Senin, 10-7-2023, Pembahasan naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan Pemprov Sumatera Selatan 13. Selasa, 14-8-2023, Pembahasan naskah kerja sama (KSA) TPA Piyungan 14. Jumat, 14-8-2023, Pembahasan rencana kerja antara Pemda DIY dengan BKKBN 15. Jumat, 15-8-2023, Pembahasan rencana kerja Pemda DIY dengan Lemhans 16. Rabu, 27-9-2023, Inventarisasi dan analisis kerja sama daerah Kabupaten/Nota se-DIY 17. Rabu, 4-10-2023, Pembahasan rencana kerja sama antara TNI AU dengan Pemda DIY 18. Selasa, 17-10-2023, Pembahasan rencana kerja sama antara Yayasan Karyo Bina dengan Pemda DIY 19. Senin, 6-11-2023, Pembahasan rencana kerja antara Koperasi Daerah DIY dan Pemda DIY 20. Rabu, 8-11-2023, Monev pelaksanaan kerja sama antara Pemprov Jember dengan Pemda DIY -Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa Tim TKKSD mengalami perubahan personel 2. Masih ada beberapa instansi yang belum memahami tentang jenis kerja sama apa yang bisa di fasilitasi di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 3. Sangat susah mengumpulkan Tim TKKSD secara utuh pada forum rapat off line. <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim TKKSD telah memahami dasar hukum pelaksanaan kerja sama daerah di DIY yaitu PP09/2018 dan Permendagri 22/2010. 2. Tim TKKSD sangat membantu dalam proses penyusunan naskah kerja terutama menanggapi permasalahan yang timbul antar para pihak ketika proses penyusunan naskah. 3. Rapat on line sangat membantu dalam pelaksanaan rapat penyusunan naskah kerja sama karena tidak perlu mengundang Tim TKKSD untuk bisa mengikuti rapat di sela kesibukan masing-masing. |
| 9.3.1 | 4.01.03.1.03.01 | Facilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | 190.699.400 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 190.699.400 | 100,00 | 190.041.116 | 99,65 | 0,35 | | | <p>1. Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang difasilitasi : 56 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1mfErlumH5Ckz25pVHT9f9y97g?usp=sharing</p> | |
| 10 | 4.01.10 | PROGRAM PENYELANGSARAAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | 3.193.542.350 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 3.193.542.350 | 100,00 | 3.037.250.397 | 95,11 | 4,89 | | | | |
| 10.1 | 4.01.10.5.01 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan | 2.874.183.550 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2.874.183.550 | 100,00 | 2.725.766.297 | 94,84 | 5,16 | | | | |
| 10.1.1 | 4.01.10.5.01.10 | Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan | 2.874.183.550 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2.874.183.550 | 100,00 | 2.725.766.297 | 94,84 | 5,16 | | | | <p>1. Testimoni Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren Dalam Pelaksanaan Kick Off Meeting Reformasi Birokrasi Kelurahan pada tanggal 23 Oktober 2023 2. Testimoni Persepsi Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pada Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan tanggal 20 November</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=xYXG12QeE https://biturl.com/TestimoniPersepsiBimtek</p> <p>BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan yang Ditata : 2 Dokumen dari 9 Dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penerapan Kelembagaan Kelurahan / Kapanewon/Kemantren - Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan koordinasi, penentuan dan evaluasi penerapan kelembagaan Kapanewon / Kemantren melalui koordinasi internal menertibkan bahan materi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait - Tertetapkannya koordinasi, penentuan dan evaluasi penerapan kelembagaan Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan melalui koordinasi lapangan ke Kabupaten/Banteh dilakukan melalui forum rapat kerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dengan sasaran pembaharuan 8 area perubahan pada penerapan reformasi birokrasi kelurahan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal 24 Januari 2023 dengan sasaran pembaharuan area manajemen perubahan dan pengisian area penerapan organisasi, tata laksana dan pengisian pengisian b. Tanggal 25 Januari 2023 dengan sasaran pembaharuan area perubahan Penguatan SDM c. Tanggal 26 Januari 2023 dengan sasaran pembaharuan area perubahan Penguatan Akuntabilitas d. Tanggal 27 Januari 2023 dengan sasaran pembaharuan area perubahan Penguatan Pelayanan Publik Quick Wins dan Lembar Kerja Evaluasi -Peningkatan terhadap kebijakan reformasi birokrasi kelurahan melalui Rapat Koordinasi dan Berbagi Kerja Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan subtematik 4 kali melibatkan OPD Pemda Kabupaten, Pagiubun Lurah dan Pamong serta kaparewon dengan randani: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal 21 Februari di Kabupaten Bantul b. Tanggal 22 Februari di Kabupaten Gunungkidul c. Tanggal 23 Februari di Kabupaten Kulon Progo d. Tanggal 27 Februari di Kabupaten Sleman - Koordinasi bersama Akademisi untuk memedah draft perubah Reformasi Birokrasi Kelurahan pada tanggal 15 Maret untuk mendiskusikan jalurnya RIBK. - Pelaksanaan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal 26 Maret di Kelurahan Gedongkwo, Kemantren Nyanjanta, Kota Yogyakarta b. Tanggal 28 Maret di Kelurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul c. Tanggal 29 Maret di Kabupaten Geresmit, Kapanewon Pajegan, Kabupaten Bantul d. Tanggal 31 Maret di Kabupaten Mantik, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul - Tanggal 6 April di Kelurahan Wukirsari, Kapanewon Cangriangan, Kabupaten Sleman <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal 11 April di Kelurahan Selomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo b. Tanggal 14 April di Kelurahan Tiyang, Kapanewon Gersubo, Kabupaten Gunungkidul c. Tanggal 19 Mei Pelaksanaan Forum Komunikasi melibatkan SDM Nyanjanta dan OPD Pemda DIY d. Tanggal 21 Agustus Pelaksanaan Forum Komunikasi melibatkan SDM Pagiubun Lurah DIY Yogyakarta e. Tanggal 22 dan 23 Pelaksanaan Forum Komunikasi melibatkan aparatur pemerintahan Kelurahan yang bertanggung terkait sistem informasi kelurahan bertema: opt. STPMO APMD melibatkan Nusanumber dari akademisi. - Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan melibatkan unsur dari Pagiubun Duluh se-DIY dengan melibatkan pemateri dari Kraton dan Nyanjanta pada tanggal 28 Februari - Tersusunnya Laporan Progress Dokumen Penerapan Kelembagaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan 2) Laporan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Penentuan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Pagiubun Lurah dan Pamong DIY Nyanjanta serta pelaksanaan Rapat Kerja Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Optimalisasi Tenaga Ahli dengan melibatkan akademisi dari kelas STPMO APMD, Dr.Sutoro Eko Yunarto dan Bapak Dharma Sutardana. - Tersusunnya laporan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Penentuan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan 3) Sosialisasi Kelembagaan Asli DIY <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pengamatan materi dan penyusunan kerangka acuan kerja rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi kelembagaan asli DIY dengan hasil pelaksanaan di bulan Februari sebelumnya 10 kali melibatkan aparat pemerintah kelurahan di Kabupaten Sleman - Berlangsungnya sosialisasi kelembagaan asli Daerah selimewo Yogyakarta melibatkan Lurah/Pamong Kelurahan, Badan Permasyarakatan Kelurahan serta Ketua Dukuh, dengan rundown sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal 21-24 Februari dengan lokasi peserta dari Kelurahan se-Kabupaten Sleman b. Tanggal 27 Februari dengan lokasi peserta dari Kabupaten Bantul c. Tanggal 14-15,16,17 dan 17 Maret dengan lokasi peserta dari Kabupaten Gunungkidul d. Tanggal 8, 9, 15, 16, dan 17 Maret 2023 dengan lokasi peserta dari Kabupaten Gunungkidul e. Tanggal 11,15,16,17 dan 19 Mei 2023 dengan lokasi peserta dari Kabupaten Kulon Progo f. Tanggal 15,16,22,23 dan 26 Juni 2023 dengan lokasi peserta dari Kota Yogyakarta g. Tanggal 12,14,17,21 dan 26 Juli 2023 dengan lokasi peserta dari Kota Yogyakarta h. Tanggal 22, 25,28,29,30,31 Agustus 2023 dengan lokasi peserta dari Kota Yogyakarta -Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kelembagaan asli 60 kali. 4) Pengembangan Sistem Informasi Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi untuk membahas KAK dan Focus Group Discussion Pengembangan Sistem Informasi Kelurahan dengan konteks Kajian Peta Jalan / roadmap Sistem Informasi Kelurahan dibuat tanggal 13 Juni 2023. -Rapat Koordinasi pembahasan kerangka acuan kerja kajian peta jalan sistem informasi kelurahan - Focus Group Discussion Kajian Peta Jalan Sistem Informasi Kelurahan pada tanggal 13 Juni dan 10 Agustus -Ekspose Kajian Peta Jalan Sistem Informasi Kelurahan |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progress Bulan | |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------|--|---|--|----------|---------------------------|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | | | | | | | Deviasi |
| 10.2.1 | 4.01.10.5.07.01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kembangan | 319.358.800 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 319.358.800 | 100,00 | 311.484.100 | 97,53 | 2,47 | Testimoni Ketua Paguyuban Lurah DIY Ngeyotaka terkait coding Jenggotan yang dipergunakan untuk ruang kerja Ngeyotaka | https://tinyurl.com/FasilitasuagapaguyubanLurah | BIRO TATA PERHESANTAMAN - Pemerintahan Kabupaten/Kelurahan dan Kabupaten/Kemantren | | | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Rehab Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rehab Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY - Pelaksanaan Rehab Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY 2) Air Conditioner - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Air Conditioner - Pelaksanaan Pengadaan Air Conditioner dengan spesifikasi: AC PSC, spesifikasi: 1 pk 3) Printer - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Printer - Pelaksanaan Pengadaan Printer dengan spesifikasi: PRINTER HP LASERJET PRO MFP M427/row 4) Televisi - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Televisi - Pelaksanaan Pengadaan Televisi dengan spesifikasi: 60" 5) Personal Computer - Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Personal Computer - Pelaksanaan Pengadaan Personal Computer dengan spesifikasi: All In One PC-Black-Monitor 21 in-USB Keyboard & M... 6) Laptop - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Laptop - Pelaksanaan Pengadaan Laptop dengan spesifikasi: i7 7) LCD - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan LCD - Pelaksanaan Pengadaan LCD dengan spesifikasi: LCD 5300 Lumen WiFi Projector <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi LS, harga penawaran dari penyedia lebih mahal. 2. Tidak ada hambatan berarti <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya diri Pemakaian Gedung di Jenggotan dari Dinas PU untuk dipergunakan Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY - Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang sesuai spesifik. |
| Jumlah | | | 5.406.383.650 | 100,00 | 100,00 | | 5.406.383.650 | 100,00 | 5.153.795.944 | 95,33 | | | | | | | |